



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

## TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW



## Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan izin-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Pembuatan LAKIP adalah tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersendikan transparansi, partisipasi dan akuntabel, maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow wajib menginformasikan kinerjanya kepada pemberi amanah, sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sebagai upaya bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam meningkatkan kinerjanya kedepan.

Oleh karena itu LKjIP Tahun 2024 yang disusun ini diupayakan dapat memberikan gambaran atas kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam mewujudkan visi Kabupaten Bolaang Mongondow, "Menuju Bolaang Mongondow Hebat" sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026

Lolak, 17 Maret 2025

**Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW**

**dr. JUSNAN C. MOKOGINTA**



# Bab. I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian ditegaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya sesuai perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling utama dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Jika dikaitkan dengan desentralisasi dan otonomi daerah, yang paling relevan dan signifikan mempengaruhi implementasi desentralisasi dan otonomi daerah kedepan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan menuju Good Governance adalah kemampuan pemerintah daerah, dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang diikuti dengan kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas menuju terwujudnya Visi -

Misi Kabupaten Bolaang Mongondow, disertai dengan adanya sistem pelaporan yang akuntabel dan transparan.

Keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan misi organisasi dapat diukur, antara lain melalui evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan. Akuntabilitas kinerja instansi dapat ditegakkan apabila telah mencakup 3 aspek yang merupakan suatu sinergi, yakni:



1. Akuntabilitas Manajemen, fokusnya adalah pada kesanggupan (enablers) dan efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya manajemen, seperti dana, aset (hartakekayaan), tenaga kerja, maupun sumber daya yang lain, dimana pertanggungjawabannya tidak terbatas pada kesesuaian pelaksanaan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga menjelaskan mengenai proses manajerial yang berkelanjutan.
2. Akuntabilitas proses, fokusnya adalah pertanggungjawaban pada kebijakan dan strategi yang digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ditempuh mulai dari proses perumusan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian sampai dengan evaluasi serta tindakan-tindakan koreksi, apakah semua proses sudah sesuai dengan misi instansi.
3. Akuntabilitas program, fokusnya adalah pada pencapaian hasil kegiatan instansi apakah sudah memberi kepuasan/kenyamanan kepada pelanggan (Customer) dan stakeholder serta memberikan dampak positif kepada kemajuan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas



Sistem Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran menjadi media pertanggungjawaban dan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Tingkat Akuntabilitas Instansi Pemerintah mencerminkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara/daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis.

## **1.2. Gambaran Umum Kabupaten Bolaang Mongondow**

Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan salah satu daerah otonom dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822). Di tahun 2005 Kabupaten Bolaang Mongondow terbagi dalam beberapa wilayah kecamatan dengan ibukota Kabupaten terletak di Kec. Kotamobagu yang juga merupakan pusat pemerintahan, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Proses penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Bolaang Mongondow yang berlangsung selama ini, selain telah menghasilkan kemajuan yang cukup signifikan. Semangat otonomi daerah juga telah menciptakan perubahan besar dalam tatanan pemerintahan serta telah memberikan nuansa baru dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan.

### 1.3. Aspek Geografi dan Demografi

#### 1.3.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Ibukota Lolak, secara geografis terletak pada posisi  $123^{\circ}$  -  $124^{\circ}$  BT dan  $0^{\circ} 30'$  -  $1^{\circ} 0'$  LU. Peta Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat pada Gambar 1.1.

**Gambar 1.1**  
**Letak Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara.**



**Sumber RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow, 2014-2034**

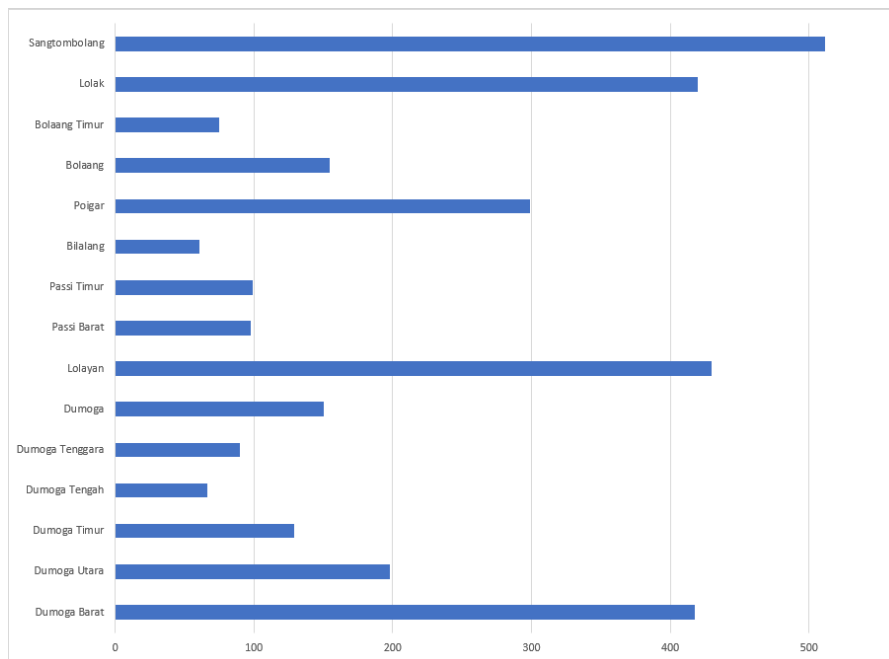
Kabupaten Bolaang Mongondow secara geografis berada di wilayah selatan Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas wilayah **4.083,94 KM<sup>2</sup>** berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun

2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Secara geografis terletak pada posisi  $123^{\circ} - 124^{\circ}$  BT dan  $0^{\circ} 30' - 1^{\circ} 0'$  LU. Adapun batas-batas tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Sulawesi,
- Sebelah Timur : Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,
- Sebelah Barat : Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

**Gambar 1.2**  
**Luas wilayah Per Kecamatan**



**Sumber Bolaang Mongondow Dalam Angka 2021**

Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow terbagi atas 15 Kecamatan dan 202 Desa/Kelurahan, yang terdiri atas kecamatan:



1. Kecamatan Dumoga Barat
2. Kecamatan Dumoga Utara
3. Kecamatan Dumoga Timur
4. Kecamatan Dumoga
5. Kecamatan Dumoga Tengah
6. Kecamatan Dumoga Tenggara
7. Kecamatan Passi Barat
8. Kecamatan Passi Timur
9. Kecamatan Bilalang
10. Kecamatan Poigar
11. Kecamatan Bolaang
12. Kecamatan Bolaang Timur
13. Kecamatan Lolak
14. Kecamatan Sang Sombolang.
15. Kecamatan Lolayan

### **1.3.2. Kondisi Topografi**

Keadaan topografi Kabupaten Bolaang Mongondow cukup bervariasi dari daerah yang dataran rendah, bergelombang, berbukit serta bergunung dengan tingkat kemiringan antara 0% - 45% serta mempunyai ketinggian bervariasi pula antara 0 - 650 meter di atas permukaan laut. Sementara yang terendah atau ketinggiannya 0 - 2 meter dari permukaan laut umumnya terdapat pada kecamatan yang terletak disepanjang pesisir pantai utara Kabupaten Bolaang Mongondow. Jalur gunung membentang daritimur ke barat pada bagian utara yang mengapit Dataran Dumoga dan Dataran Mongondow. Terdapat 5 gunung di Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana yang tertinggi adalah gunung Kabela terletak di Kecamatan Lolak dengan ketinggian 1.732 meter, sedangkan yang terendah adalah gunung Kapaya terletak di Kecamatan Bolaang dengan ketinggian 1.331 meter.

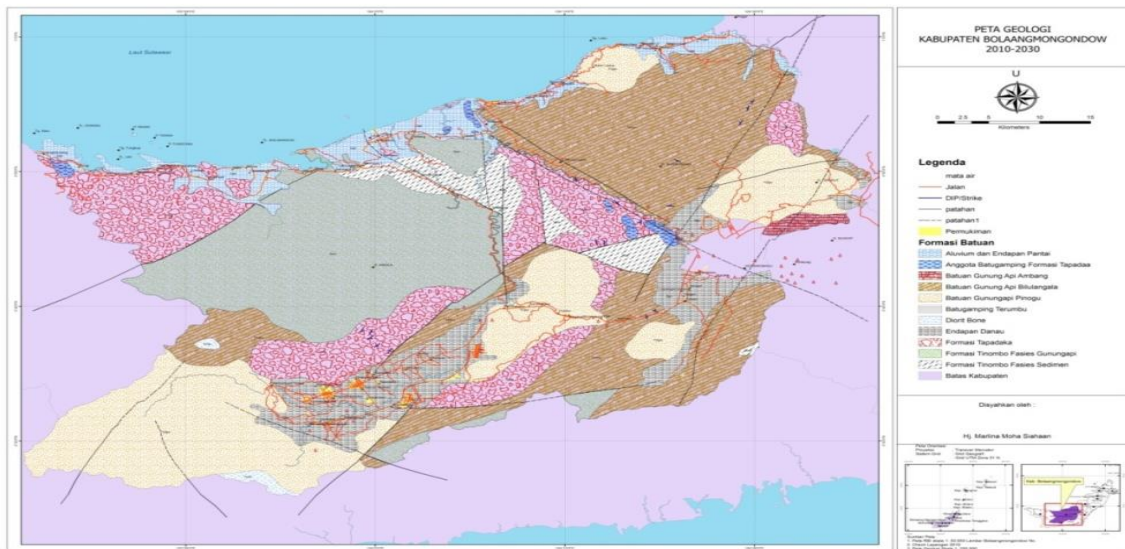
### **1.3.3. Kondisi Geologi.**

Menurut hasil penelitian Kementerian ESDM(2004), bagian dari kawasan Indonesia Timur termasuk Bolaang Mongondow, secara geologi memiliki karakteristik yang lebih kompleks dan rumit bila dibandingkan dengan kawasan Indonesia Barat. Ini dikarenakan kawasan timur Indonesia merupakan pertemuan dari lempeng-



lempeng litosfera : Eurasia yang relatif stabil di bagian barat laut, Lempeng Indo-Australia di bagian barat dan baratdaya yang bergerak relatif ke timurlaut, Lempeng Pasifik di bagian timur yang bergerak ke barat laut dan Lempeng Filipina Barat di bagian timur laut yang bergerak ke arah barat.

**Gambar 1.3**  
**Peta Geologi Kabupaten Bolaang Mongondow**



**Sumber RTRW Kab Bolaang Mongondow, 2014-2034**

Bagian timur laut Sulawesi merupakan akibat perputaran searah jarum jam dari lempeng kecil bagian barat daya Sulawesi dan Kalimantan pada masa lalu yang diikat pada bagian barat daya oleh sistem busur pada sesar-sesar mendatar mengiris, dan penolakan dasar laut Sulawesi di utara oleh adanya penujangan di Parit Sulawesi Utara.

Berdasarkan peta Geologi di atas Formasi Geologi yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari :

Qal : Aluvium dan Endapan Pantai terdiri dari material berupa pasir, lempung, lumpur, kerikil dan kerakal.

Qav : Batuan Gunung Api Ambang yang terdiri dari material tuf; aglomerat, lahar lava dan endapan belerang didalam kawah, tuf berwarna kelabu muda, lava pejal, bersusunan hipersenten-hornblenda dan andesit



- hornblende. Gunung Api Ambang masih aktif, bebentuk strato dengan lima lapangan fumarola.
- Ql : Batu gamping Terumbu; Batu gamping terumbu terangkat dan batu gamping klastik dengan komponen utama koral, setempat berlapis.
- Qpl : Endapan Danau; satuan ini dikuasai oleh batu lempung kelabu, setempat mengandung sisa tumbuhan dan lignit. Batu pasir berbutir halus sampai kasar serta kerikil di jumpai di beberapa tempat. Satuan ini termampatkan lemah tebalnya menurut data bor mencapai 94 m.
- TQpv : Batuan Gunung api Pinogu; satuan ini terdiri atas Tuf, tuf lapili, breksi dan lava. Breksi gunungapi di Pegunungan Bone, G. Mongadalia dan Pusian bersusunan andesit piroksin dan dasit. Tuf yang tersingkap di G. Lemimbut dan G. Lolombulan umumnya berbattu apung, kuning muda berbutir sedang sampai kasar, diselilingi oleh lava bersusunan menengah sampai basa. Tuf dan Tuf Lapili di sekitar S. Bone bersusunan dasitan, Lava berwarna kelabu muda hingga kelabu tua, umumnya bersusun andesit piroksin. Satuan ini secara umum termampatkan lemah sampai sedang, umumnya diduga berumur Pliosen hingga Plistosen.
- QTs : Molasa Selebes merupakan endapan pasca orogen yang terbentuk di cekungan-cekungan kecil, terdiri atas konglomerat, breksi serta batupasir, umumnya termampatkan lemah. Konglomerat dan breksi tersusun oleh beranekan bahan komponen berupa kepingan andesit, basal, granit, granodiorit, batugamping, batupasir maupun kuarsa. Satuan ini menunjukkan



kemiringan landai hingga 300, tebalnya mencapai beberapa puluh meter, dan berumur sekitar Pliosen-Plistosen.

Tpww : BREKSI WOBUDU : Breksi gunung api, aglomerat, tuf, tuf lapili, dan lava. Breksi gunung api berwarna kelabu, tersusun oleh kepingan andesit dan basal berukuran kerikil sampai bongkah. Tuf dan tuf lapili berwarna kuning kecoklatan, berbutir halus sampai kerikil, umumnya lunak dan berlapis. Lava berwarna kelabu, tersusun andesit sampai basal. Satuan ini menindih tak selaras Formasi Dolokapa yang berumur Miosen Tengah hingga Plistosen Akhir. Tebal satuan sekitar 1000 - 1500 meter.

Tmts : Formasi Tapadaka terdiri dari Batupasir, gres, batupasir terkersikkan dan serpih. Batupasir berwarna kelabu muda hingga tua dan hijau, berbutir halus sampai kasar, mengandung batuan gunungapi hijau dan serpih merah, setempat-setempat gampingan. Batu pasir yang tersingkap di S. Tapadaka mengandung urat kalsit 0,5 - 1 m. Gres berbutir halus sampai kasar, bersudut sampai membulat, pejal, tersusun oleh plagioklas, kuarsa, dan sedikit hematit dan magnetit. Batupasir yang tersingkap di sebelah selatan Macia terkersikkan, hijau, kompak, mengandung feldspar dan sedikit pirit.

Tmtl : dan kalkopirit.

Anggota Batugamping Formasi Tapadaka: Batugamping kelabu terang, pejal, mengandung pecahan batuan gunungapi hijau. Batugamping ini sebagian membentuk lensa-lensa di dalam Formasi Tapadaka dan sebagian terlihat berganti fasies ke arah samping menjadi



batupasir. Fosil-fosil yang dikandungnya adalah *Lepidocyclina* (*Eulepidina*) sp. Umur satuan ini  
Tmbl : diperkirakan Miosen Awal hingga Miosen Akhir.

Anggota Batugamping Batuan Gunungapi Bilungala  
Batugamping Tmbl kelabu mengandung fosil  
*Lepislocyclina sumatransis* (BRADY). Kumpulan fosil  
tersebut menunjukkan umur Miosen Awal - Miosen

Tets : Akhir (Kadar. D.C. hubungan tertulis, 1972).

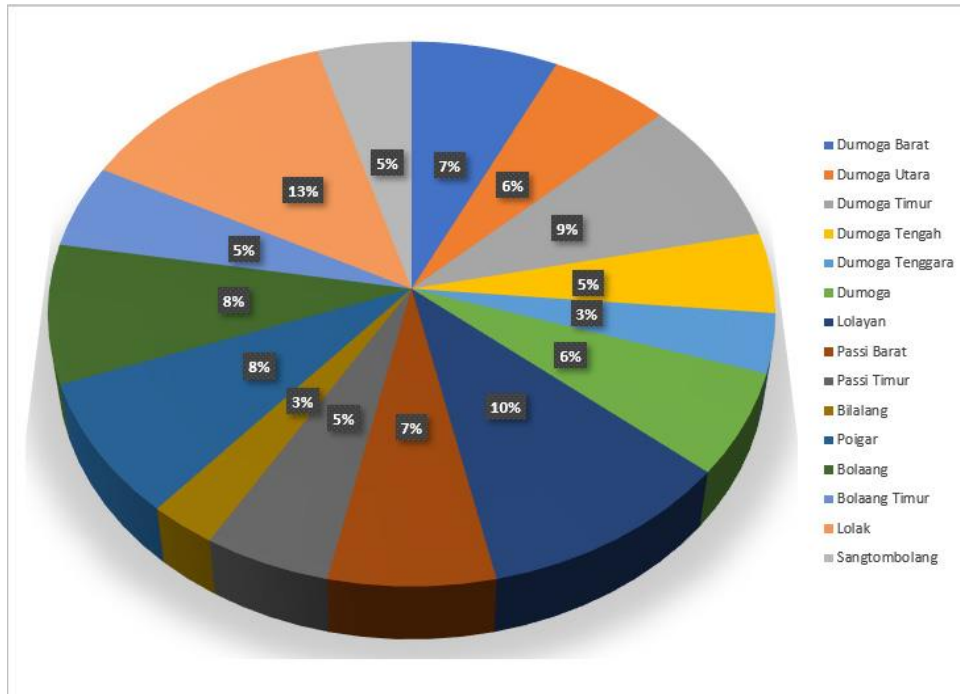
Formasi Tinombo Fasies Sedimen (Ahlburg. 1913) :  
Satuan ini mengandung Serpih dan batupasir dengan  
sisipan batugamping dan rijang. Serpih kelabu dan  
merah, getas, sebagian gampingan; rijang mengandung  
radiobria. Batupasir berupa greiwake dan batupasir  
kuarsa. kelabu dan hijau. pejal. berbutir halus sampai  
sedang. sebagian mengandung, pirit. Sisipan  
batugamping di S. Mayambak berwarna merah, pejal,  
berlapis baik. Satuan batuan ini diterobos oleh granit,  
diorit dan trakit seperti yang terlihat di S. Bayau.  
Satuan ini mempunyai hubungan menjemari dengan  
Formasi Tinombo fasies gunung api.

## **1.4. Demografi**

### **1.4.1. Jumlah Penduduk**

Sementara itu Berdasarkan Bolaang Mongondow dalam angka yang telah di rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2024 tercatat sebanyak 257.378 jiwa. Kecamatan Lolak merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 34.179 jiwa atau 13,00 persen dari total penduduk diikuti oleh Kecamatan Lolayan dengan persentase penduduk sebesar 10,55 persen atau sebanyak 26.359 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Bilalang dengan jumlah penduduk 6.859 jiwa.

**Gambar 1.4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan**  
**Tahun 2015-2020**



*Sumber. BPS, Bolaang Mongondow Dalam Angka 2021*

#### 1.4.2. Laju Pertumbuhan penduduk

Secara keseluruhan, laju pertumbuhan penduduk tahunan Kabupaten Bolaang Mongondow di tahun 2020 - 2024 hanya sebesar 1,80% dibandingkan jumlah penduduk di tahun Tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow mencapai 257.378 jiwa

**Tabel 1.1**  
**Jumlah dan laju Pertumbuhan Penduduk**  
**Menurut Kecamatan**



Kecamatan District	Jumlah Penduduk (jiwa) Population (people)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2024 (%) Annual Population Growth Rate 2020–2024 (%)
(1)	(2)	(3)
Dumoga Barat	18.516	...
Dumoga Utara	15.270	...
Dumoga Timur	21.774	...
Dumoga Tengah	11.897	...
Dumoga Tenggara	9.334	...
Dumoga	15.778	...
Lolayan	27.569	...
Passi Barat	17.534	...
Passi Timur	13.293	...
Bilalang	7.042	...
Poigar	19.689	...
Bolaang	21.386	...
Bolaang Timur	12.674	...
Lolak	34.179	...
Sangtombolang	11.443	...
<b>Bolaang Mongondow</b>	<b>257.378</b>	<b>...</b>

Sumber. Bolaang Mongondow Dalam Angka 2024.

## 1.5. Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah

### Permasalahan Utama (Isu Strategis) yang Dihadapi

Berdasarkan hasil analisis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023–2026, permasalahan utama yang dihadapi pemerintah daerah meliputi:

1. **Masih lemahnya daya saing ekonomi daerah**, yang ditandai oleh rendahnya diversifikasi ekonomi, ketergantungan terhadap sektor primer, serta belum optimalnya pengembangan potensi lokal dan investasi swasta.
2. **Kesenjangan pembangunan antarwilayah**, terutama antara kawasan perkotaan dan pedesaan, akibat keterbatasan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
3. **Rendahnya kualitas sumber daya manusia**, yang ditunjukkan oleh angka kemiskinan dan pengangguran yang



masih tinggi, serta rendahnya tingkat pendidikan dan kompetensi tenaga kerja lokal.

4. **Keterbatasan kapasitas fiskal daerah**, di mana sebagian besar struktur belanja APBD masih terserap oleh belanja pegawai, sementara belanja untuk pelayanan publik dan pembangunan fisik masih terbatas.
5. **Isu lingkungan dan ketahanan bencana**, mengingat sebagian wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan kawasan rawan bencana seperti banjir, longsor, dan gempa bumi.
6. **Tantangan implementasi reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik**, yang masih memerlukan penguatan dalam aspek kelembagaan, sumber daya manusia, serta infrastruktur teknologi informasi.

#### **1.6. Arah Penanganan Isu Strategis**

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- Meningkatkan sinergi pembangunan daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- Mempercepat transformasi ekonomi melalui hilirisasi sektor pertanian dan penguatan industri berbasis sumber daya lokal.
- Mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah untuk mendukung belanja publik yang berkualitas.
- Mendorong inovasi pelayanan publik berbasis digital dan partisipasi masyarakat.
- Membangun sistem ketahanan daerah dalam menghadapi risiko bencana dan dinamika perubahan iklim.

#### **1.7. Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten



Bolaang Mongondow melalui kajian teknis bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 28 Oktober 2016.

Adapun Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai Daerah Nomor 14 tahun 2016 sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah terdiri dari 10 Bagian yakni Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Layanan Pengadaan, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Bagian Organisasi, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum dan Perlengkapan, Bagian Tata Usaha Pimpinan, Humas dan Protokol
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Dinas daerah ada 24 dinas yaitu : Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perikanan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan ESDM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat.
4. Lembaga teknis terdiri dari
  - Inspektorat Daerah





- Badan berjumlah 3 badan terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- 5. Rumah sakit ada 1 yakni Rumah Sakit Umum Datoe Binangkang
- 6. Kecamatan (15 Kecamatan ) terdiri dari Kecamatan Bilalang, Kecamatan Bolaang Timur, Kecamatan Dumoga Utara, Kecamatan Dumoga Barat, Kecamatan Dumoga Timur, Kecamatan Lolak, Kecamatan Poigar, Kecamatan Sangtombolang, Kecamatan Lolayan, Kecamatan Passi Timur, Kecamatan Passi Barat, Kecamatan Bolaang, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kecamatan Dumoga Tengah, Kecamatan Dumoga
- 7. Kelurahan ada 2 yakni Kelurahan Inobonto dan Kelurahan Imandi
- 8. Perangkat Daerah yang masih diatur pada Perda tersendiri yakni:
  - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai Perda Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
  - Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai Perda Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

### 1.8. Kondisi Pegawai Negeri Sipil

Keadaan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bolaang Mongondow hingga Desember Tahun 2021 berjumlah 3970 orang sesuai data dari Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dengan rincian sebagai berikut :

#### a. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Fungsional Tertentu	:	2411	Orang
Fungsional Umum	:	982	Orang

#### b. Struktural

Golongan IV	:	899	Orang
-------------	---	-----	-------





Golongan III	:	2370	Orang
Golongan II	:	692	Orang
Golongan I	:	9	Orang
Jumlah		:	3970 Orang

#### c. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Lulusan SD	:	2	Orang
Lulusan SMP	:	11	Orang
Lulusan SMU Sederajat	:	944	Orang
Lulusan Sarjana muda D1	:	33	Orang
Lulusan Sarjana muda D2	:	161	Orang
Lulusan Sarjana muda D3	:	409	Orang
Lulusan Sarjana S1	:	2212	Orang
Lulusan Sarjana S2	:	108	Orang
Lulusan Sarjana, Doctor/Ph.D	:	3	Orang
Jumlah		:	3970 Orang



#### d. Esselonering

Esselon II/a	:	1	Orang
Esselon II/b	:	37	Orang
Esselon III/a	:	64	Orang
Esselon III/b	:	110	Orang
Esselon IV/a	:	327	Orang
Esselon IV/b	:	38	Orang



Jumlah : 577 Orang



## **Bab. II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 Visi dan Misi Kabupaten Bolaang Mongondow 2005- 2025**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2005 - 2025. RPD Memuat visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bolaang Mongondow, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Utara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 adalah dokumen yang menyajikan sejauh mana Pencapaian dari Perencanaan, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow yang akan dicapai Kepala Daerah prioritas pembangunan daerah, serta tahapan pelaksanaannya selang Tahun 2021.

Tujuan pembangunan baik nasional dan daerah telah digariskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jika tujuan yang dimandatkan oleh Konstitusi ini disarikan, akan tampak bahwa mandat yang diberikan



Negara kepada para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara negara dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah untuk memuliakan manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkup terkecil hingga kelingkup dunia.

## **2.2. Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow 2005- 2025**

Upaya mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan daerah adalah untuk mewujudkan **“Bolaang Mongondow yang baru, berbudaya, berdaya saing dan Mandiri Sebagai Lumbung Pangan Indonesia timur“** dengan penjelasan sebagai berikut:

- **Bolaang Mongondow yang Baru:** berarti terwujudnya masyarakat Bolaang Mongondow yang baru secara administrasi dimana sudah melaksanakan pemekaran sehingga menjadi 4 kabupaten dan 1 Kota dan pada suatu saat akan kembali bergabung menjadi satu bagian menjadi Propinsi Bolaang Mongondow.
- **Bolaang Mongondow yang Berbudaya:** berarti terwujudnya masyarakat Bolaang Mongondow yang tetap memegang teguh kearifan lokal dengan prinsip Mototabian, mototanoban yang tercermin dalam budaya moposat. Masyarakat Bolaang Mongondow memiliki karakter yang mampu



menerima dan mengadopsi budaya modern yang konstruktif, agamais, berkeadilan serta berkepribadian/berjati diri yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin, berdaya tahan, dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi.

- ***Bolaang Mongondow yang berdaya saing***: berarti terwujudnya seluruh masyarakat Bolaang Mongondow yang sehat, cerdas untuk menjadi unggul di segala bidang, serta mampu berperan dalam pembangunan nasional maupun internasional. Berdaya saing disini juga berarti Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi kabupaten yang memiliki kemampuan untuk menjadi terdepan dalam hal kemampuan menghasilkan produksi lokal dengan kualitas internasional.
- ***Bolaang Mongondow yang mandiri*** : berarti merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan, dan daya beli masyarakat, terpenuhinya sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu dari sekian banyak tujuan pembangunan lainnya, yang pada gilirannya akan mewujudkan masyarakat Bolaang mongondow yang memiliki penghidupan yang layak, bebas dari segala macam gangguan agar dapat menjalani kehidupan yang aman, sentosa, dan makmur.
- Ukuran **Lambung Pangan** ditunjukkan oleh meningkatnya kemampuan produksi dari segala sumber daya ekonomi dan sosial budaya seperti pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan, perdagangan, tenagakerja, dan pariwisata. Hal ini dapat diukur melalui bertambahnya nilai produksi



dari sumber daya ekonomi dan sosial budaya tersebut. Sehingga mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow kedepan.

Visi tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) misi yaitu:

**1. Mewujudkan Bolaang Mongondow yang berbudaya dan berdaya saing.**

Misi pertama ini ditunjukkan dengan upaya pemerintah dan Masyarakat Bolaang Mongondow untuk melaksanakan pembangunan menjadikan sumberdaya manusia sebagai subjek pembangunan, mendidik sumberdaya manusia Bolaang Mongondow yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kualitas dan integritas serta berperikemanusiaan, memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi tanpa meninggalkan kearifan lokal yang diwariskan oleh nenek moyang Bolaang Mongondow, memiliki derajat kesehatan yang tinggi sehingga memenuhi syarat maupun prasyarat masyarakat intelektual yang bermartabat. Pada gilirannya dengan kemampuan moral, etika, dan intelektual, masyarakat Bolaang Mongondow mampu memproduksi barang dan jasa, serta usaha-usaha lainnya yang dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat dan daerah.

**2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.**

Misi kedua ini ditunjukkan dengan kemampuan pemerintah dan masyarakat yang mampu



melaksanakan menyediakan dan memantapkan kondisi infrastruktur dasar sebagai salahsatu syarat dan prasyarat pembangunan bangsa. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas yang mampu memenuhi standar pelayanan minimal sehingga dapat menjadi alat dalam mencapai kemakmuran bersama. Dengan adanya pelayanan pemerintahan yang secara koordinatif mampu melakukan kontrol yang efektif terhadap pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana baik infrastruktur dasar, suprastruktur dan manajemen pembangunan dengan mempertahankan keseimbangan aspek pemanfaatan sumberdaya alam sebagai modal utama dalam sistem pembangunan berkelanjutan yang mampu menekan efek *climate change*.

Pembangunan Sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan/pemukiman dan lingkungan serta infrastruktur keagamaan menjadi alat dalam mendorong kemampuan daerah menjadi mandiri dan berdayasaing.

### **3. Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri bertumpu pada potensi sumberdaya lokal.**

Misi ketiga ini ditunjukkan dengan pembangunan ekonomi daerah dari segala sektor ekonomi dalam rangka mencapai peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terutama dari usaha perekonomian yang berbasis sumberdaya alam baik didarat maupun di laut, dengan memanfaatkan semua potensi sumberdaya alam yang ada,





membangun kondisi iklim investasi yang baik dengan proses pembangunan yang berlandaskan pada pengelolaan sumber daya alam demi kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat atau kelompok dengan berbagai bantuan modal maupun pelatihan. Selain itu melaksanakan pengembangan kawasan sentra ekonomi ataupun semacamnya guna meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah dalam melaksanakan kegiatan ekonomi.

Dalam kemandiriannya suatu daerah dapat terlihat dengan besaran pendapatan perkapita, Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, serta prosentase dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemandirian juga dapat terlihat dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan Kesehatan dan Pendidikan tanpa harus lagi keluar daerah dalam mendapatkan pelayanan.

#### **4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Demokratis dan Bebas KKN.**

Misi keempat ini ditunjukkan dengan upaya melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governace*), terjaminnya penegakan hukum terhadap praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang didukung oleh lembaga legislatif daerah



yang kuat serta legitimasi penuh masyarakat. Pemerintahan daerah yang baik, bersih dan demokratis adalah daerah yang aman dan damai karena warganya taat dan patuh terhadap hukum di satu sisi, dan di sisi lain, hak-hak masyarakat terlindungi dan terakomodasi dalam sistem sosial, ekonomi, politik, pemerintahan dan pembangunan.

#### **5. Mewujudkan Bolaang Mongondow Sebagai Lumbung Pangan di Indonesia Bagian Timur.**

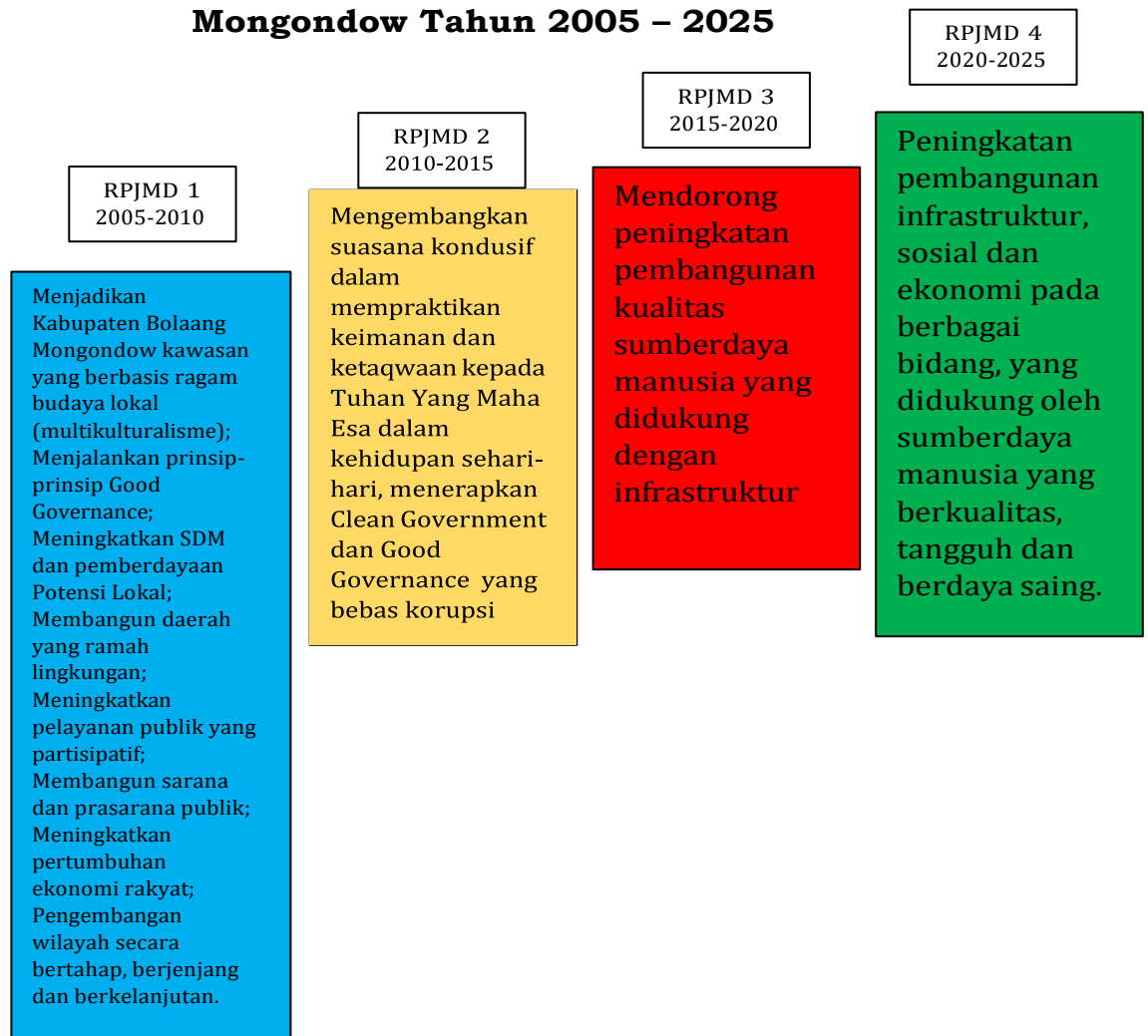
Misi kelima ini ditunjukkan dengan upaya mengerahkan fokus pembangunan kabupaten Bolaang Mongondow dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan untuk menjadikan Kabupaten ini sebagai lumbung pangan di Indonesia Bagian Timur.

RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan, yang dapat dilihat pada Gambar 2.1.



## Gambar 2.1. Kerangka RPJPD Kabupaten Bolaang

### Mongondow Tahun 2005 – 2025





Adapun keterkaitan Isu strategis dan rumusan Misi dalam RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2005 – 2025 pada tabel 2.1 Berikut :

**Tabel 2.1. Keterkaitan Isu Strategis dengan rumusan Misi RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow 2005-2025.**

<b>Isu Strategis RPD 2023-2026</b>	<b>No Misi</b>	<b>Rumusan Misi RPJPD Bolaang Mongondow</b>
Meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal.	3	Mewujudkan perekonomian Daerah yang mandiri bertumpu pada potensi sumberdaya lokal.
Menguatkan lumbung pangan dan kualitas sumberdaya manusia yang mampu berdaya saing dan mandiri.	1	Mewujudkan Bolaang Mongondow yang berbudaya dan berdaya saing.
	5	Mewujudkan Bolaang Mongondow Sebagai Lumbung Pangan Di Indonesia Bagian Timur
Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata sesuai dengan potensi daerah serta peningkatan konektivitas antar wilayah yang berwawasan lingkungan.	2	Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan



Memperkuat upaya pencapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas, modern dan pelayanan yang prima.	4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik , Bersih, Demokratis dan Bebas KKN
---	---	--

RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2005 – 2025 yang menjadi rujukan dalam penyusunan RPD Kabupaten Bolaang Mongondow juga dalam penyusunannya telah dilakukan penyelarasan dengan RPJMN dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.2. sebagai berikut :



**Tabel 2.2. Keterkaitan Visi dan Misi RPJMN 2020-2024, RPJPD Provinsi Sulawesi Utara dan RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2005 – 2025**

ITEM	RPJMN 2020-2024	RPJPD PROVINSI SULUT 2005-2025	RPJPD BOLAANG MONGONDOW
VISI	Terwujudnya Indoensia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Terwujudnya Sulawesi utara yang berbudaya, berdaya saing dan sejahtera sebagai piuntu gerbang Indonesia ke Kawasan Asia timur dan pasifik	Terwujudnya Bolaang Mongodow yang baru, berbudaya berdaya saing dan mandiri sebagai lumbung pangan Indonesia timur
MISI	Peningkatan kualitas manusia indonesia	Mewujudkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Sulawesi Utara	Mewujudkan Bolaang Mongondow yang berbudaya dan berdaya saing
	Struktur ekonomi yang produktif mandiri dan berdaya saing		Mewujudkan perekonomian Daerah yang mandiri bertumpu pada potensi sumberdaya lokal
	Pembangunan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan Sulawesi utara yang mandiri dan demokratis	Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana
	Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	Melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan	pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan
	Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	Mewujudkan Sulawesi utara yang berbudaya aman dan damai	
	Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	Mewujudkan sulawesi utara yang adil dan berpihak pada masyarakat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik , Bersih, Demokratis dan Bebas KKN
	Pengelolaan pemerintahan yang bersih efektif dan terpercaya		
	Perlindungan bagi segenapbangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	Mewujudkan SULUT sebagai beranda depan di Utara NKRI yang sejahtera dan aman	Mewujudkan Bolaang Mongondow Sebagai Lumbung Pangan Di Indonesia Bagian Timur
	Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan		



Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 mendukung Fokus Kerja Presiden Tahun 2019-2024 berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/13402/SJ, Tanggal 2 Desember 2019, adapun Fokus Kerja Presiden Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

**5 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019 - 2024**

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan dinamis;
2. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian;
3. Menyederhanakan Regulasi yang menjadi kendala perubahan untuk kemajuan, utamanya dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru



dan mengoptimalkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

4. Menyederhanakan Birokrasi melalui pemangkasan proses yang panjang untuk mempermudah investasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, dari ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi negara yang memiliki daya saing manufaktur dan jasa modern, yang mempunyai nilai tambah bagi kemakmuran bangsa.

### **Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Sulut 2021-2026.**

Adapun Tujuan dan sasaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara termaktub dalam RPJMD Provinsi Sulut tahun 2001-2006 dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Sulawesi Utara sebagai berikut :

1. Misi 1: Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara.

Misi ini memiliki tujuan Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, dengan sasaran Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia. Tujuan dan sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender (IDG).

2. Misi 2 : Penguatan ekonomi yang bertumpu pada Industri Pertanian, perikanan, Pariwisata dan Jasa.

Misi kedua bertujuan untuk Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, dengan sasaran Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat. Dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi, semakin kecilnya Indeks Gini (Gini Ratio), dan penurunan Persentasi Angka Kemiskinan, serta peningkatan PDRB Sub Sektor





### Pariwisata

3. Misi 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas. Misi Ketiga memiliki tujuan Terbangunnya Infrastruktur dan konektivitas yang memadai dengan sasaran Meningkatnya Infrastruktur Dan Konektivitas. Tujuan dan sasaran ini diukur dengan Indikator kinerja peningkatan Indeks Infrastruktur.
4. Misi 4 : Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan.  
Misi keempat memiliki tujuan Terwujudnya Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan sasaran Meningkatnya Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan. Dimana Tujuan dan Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja peningkatan Indeks Indeks kesesuaian pemanfaatan ruang dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
5. Misi 5 : Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar Daerah.  
Misi Kelima bertujuan Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Birokrasi serta sinergitas antar daerah Dalam Penyelenggaraan



Pemerintahan, dengan sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan. Tujuan dan sasaran ini diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu Opini BPK, Nilai Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP), Indeks Reformasi Birokrasi dan Kualifikasi Penilaian Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Menuju Kategori IV (empat).

**Tabel 2.3. Keterkaitan Isu Strategis dengan rumusan Misi RPJMD Provinsi Sulut 2021-2026.**

Isu Strategis RPD 2023-2026	No Misi	Rumusan Misi RPJMD Provinsi Sulut
Meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal.	2	Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa
Menguatkan lumbung pangan dan kualitas sumberdaya manusia yang mampu berdaya saing dan mandiri.	1	Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara
Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata sesuai dengan potensi daerah serta peningkatan konektivitas antar wilayah yang berwawasan lingkungan.	3	Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas
	4	Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan
Memperkuat upaya pencapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas, modern dan pelayanan yang prima.	5	Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar Daerah

## 5.2. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi dan misi RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2005-2025, dimana ada 5 misi yang



akan di wujudkan dalam pembangunan daerah melalui arah kebijakan tahap ke empat rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2020-2025 yakni **“Peningkatan pembangunan infrastruktur, sosial dan ekonomi pada berbagai bidang, yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, tangguh dan berdaya saing”**.

Adapun Keterkaitan Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026 dengan visi dan misi RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2005-2025 disajikan pada tabel 2.4 berikut :



**Tabel 2.4. Keterkaitan Tujuan Pembangunan 2023-2026 dengan rumusan Misi RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow 2005-2025.**

<b>Tujuan Pembangunan</b>	<b>No Misi</b>	<b>Rumusan Misi RPJPD Kab. Bolaang Mongondow</b>
Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berdaya Saing	1	Mewujudkan Bolaang Mongondow yang berbudaya dan berdaya saing.
Terbangunnya Infrastruktur Yang Memadai	2	Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		
Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	3	Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri bertumpu pada potensi sumberdaya lokal.
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik , Bersih, Demokratis dan Bebas KKN
Meningkatkan kemandirian pangan daerah	5	Mewujudkan Bolaang Mongondow Sebagai Lumbung Pangan Di Indonesia Bagian Timur

Selain didasarkan pada RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow, tujuan dan sasaran RPD Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026 tentu memperhatikan Visi Misi serta Tujuan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, sebagai salah satu rujukan rencana pembangunan daerah sebagai amanat dari Instruksi Menteri Nomor 70 tahun 2021.

Keterkaitan Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026 dan Misi Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dapat disajikan pada tabel 2.5 berikut :



**Tabel 2.5. Keterkaitan Tujuan Pembangunan 2023-2026 dengan rumusan Misi RPJMD Provinsi Sulut 2021-2026.**

<b>Tujuan Pembangunan</b>	<b>No Misi</b>	<b>Rumusan Misi RPJMD Provinsi Sulut</b>
Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berdaya Saing	1	Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara
Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	2	Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa
Terbangunnya Infrastruktur Yang Memadai	3	Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		
Meningkatkan kemandirian pangan daerah	4	Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	5	Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar Daerah

Jika melihat tabel keterkaitan Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan misi RPJPD serta Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara maka ada 11 (sebelas) Prioritas pembangunan daerah yang menjadi prioritas pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat dijabarkan pada tabel berikut:



**Tabel 2.6. Keterkaitan Prioritas Pembangunan dan  
Arah Kebijakan Tahap ke Empat RPJPD Kab.  
Bolmong 2023-2026.**

No	Prioritas	Arah Kebijakan Tahap Ke Empat
1	Peningkatan Akses Dan Kualitas Pendidikan;	<b>“Peningkatan pembangunan infrastruktur, sosial dan ekonomi pada berbagai bidang, yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, tangguh dan berdaya saing”</b>
2	Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan;	
3	Pembangunan Infrastruktur;	
4	Penguatan UMKM Dan Koperasi;	
5	Pengembangan Pariwisata Berbasis Sumberdaya Alam Dan Kearifan Lokal;	
6	Peningkatan Perlindungan Kesejahteraan Sosial;	
7	Revitalisasi Pertanian Dengan Berbagai Subsektor Terutama Perikanan, Tanaman Pangan Dan Perkebunan;	
8	Pembangunan SDA Dan Lingkungan Hidup;	
9	Iklim Investasi Dan Usaha ;	
10	Penguatan Ekonomi Desa ;	
11	Peningkatan Kualitas Birokrasi Dan Pelayanan Publik.	

Berdasarkan Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2005-2025 serta memperhatikan misi dan tujuan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 maka Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023-2026 dapat disajikan pada tabel 5.7 sebagai berikut :

**Tabel 2.7. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2023-2026**

**“Visi RPJPD: “BOLAANG MONGONDOW YANG BARU, BERBUDAYA, BERDAYA SAING DAN MANDIRI SEBAGAI LUMBUNG PANGAN INDONESIA TIMUR “**

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
MEWUJUDKAN BOLAANG MONGONDOW YANG BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING.	MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING		INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	ANGKA	68,16	68,16	68,50	68,75	70	70,25	70,25
		MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN	INDEKS PENDIDIKAN	TAHUN	13,30	13,30	13,50	13,70	13,90	14	14
		MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN SEMESTA	RATA-RATA USIA HARAPAN HIDUP	ANGKA	69,45	69,45	69,55	69,65	69,75	70	70
		MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN	ANGKA KEMISKINAN	PERSEN	7,58	7,58	7	6,75	6,25	5,75	5,75
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN	TERBANGUNNYA INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI		INDEKS INFRASTRUKTUR	ANGKA	61,88	65	66	67	68	70	70
		MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI	RASIO PANJANG JALAN DENGAN JUMLAH KENDARAAN	ANGKA	17,47	18	23,39	24,09	24,82	25,56	25,56
			PERSENTASE PANJANG JALAN DENGAN KONDISI BAIK	PERSEN	63	65	67	69	71	73	73
		MENINGKATNYA LAYANAN AIR MINUM LAYAK	PERSENTASE RUMAH TANGGA BERAKSES AIR MINUM LAYAK	PERSEN	68,67	70,17	71,70	73,20	74,70	76,20	76,20
	MENINGKATKAN KUALITAS		INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	ANGKA	71,95	71,95	71,96	71,97	71,98	7200	72,00

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	LINGKUNGAN HIDUP	MENINGKATNYA KUALITAS AIR	INDEKS KUALITAS AIR	ANGKA	44.55	44.55	50,00	55,00	60,00	60,00	60,00
		MENINGKATNYA KUALITAS UDARA	INDEKS KUALITAS UDARA	ANGKA	95.43	95.43	95.43	95.43	95.43	95.43	95.43
		MENINGKATNYA KUALITAS TUTUPAN LAHAN	INDEKS TUTUPAN LAHAN	ANGKA	74.90	74.90	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG MANDIRI BERTUMBUH PADA POTENSI SUMBERDAYA LOKAL.	MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI		PERTUMBUHAN EKONOMI	PERSEN	3,87	4,50	4,90	5,10	5,58	6,15	6,15
			GINI RATIO		0,360	0,340	0,335	0,330	0,315	0,310	0,310
		MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN DAERAH	KONTRIBUSI PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI	PERSEN /TAHUN	10,05	10,10	10,10	10,30	10,30	10,35	10,35
			KONTRIBUSI PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI	PERSEN /TAHUN	- 0,28	1	1,22	2	2,5	3	3
	MENINGKATNYA DAYA TARIK INVESTASI BERSKALA NASIONAL	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI INVESTASI (PMA/PMDN)	PERSEN /TAHUN	5,32	10	10	10	10	10	10	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK , BERSIH, DEMOKRATIS DAN BEBAS KKN	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS		NILAI RATA RATA CAPAIAN OPINI BPK, NILAI SAKIP LPPD INDEKS PELAYANAN PUBLIK	ANGKA	71,01	-	77,5	83,5	84,75	87,75	87,75
		MENINGKATNYA KUALITAS	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	ZONA	KUNING	KUNING	KUNING	KUNING	HIJAU	HIJAU	HIJAU

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		PELAYANAN PUBLIK									
		MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH	OPINI BPK NILAI SAKIP LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	OPINI ANGKA/PREDIKAT ANGKA	WTP B 3,4	WTP B 3,5	WTP B 3,6	WTP BB 3,7	WTP BB 3,8	WTP BB 3,9	WTP BB 3,9
MEWUJUDKAN BOLAANG MONGONDOW SEBAGAI LUMBUNG PANGAN DI INDONESIA BAGIAN TIMUR	MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH		INDEKS KETAHANAN PANGAN	ANGKA	84,84	84,89	84,94	84,99	85,04	85,15	85,15
		MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS KETERSEDIAAN PANGAN	RASIO PANGAN	ANGKA	0,96	1,02	1,08	1,14	1,14	1,2	1,2



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah RPD Tahun 2023-2026. Tahun 2024 merupakan tahun Kedua pelaksanaan pembangunan daerah dengan Tema pembangunan Tahun 2024 yakni **“Pengembangan Daya Saing Untuk Memaksimalkan Investasi Dan UMKM Melalui Reformasi Birokrasi Yang Handal Disertai Sukses Pemilu Serentak”** yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2023-2026.

### A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Misi 1 : Mewujudkan Bolaang Mongondow yang Berbudaya dan Berdaya Saing</b>			
1.	Tujuan :			
	Meningkatkan Mutu Pendidikan Dan Derajat Kesehatan Masyarakat yang berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68,75
	Sasaran :			
1.1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Tahun	13,70
1.2	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Semesta	Rata Rata Usia Harapan Hidup	Angka	69,65
1.3	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Persen	6,75
	<b>Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pembangunan yang berkeadilan Dan Berkelanjutan</b>			
2.	Tujuan :			



NO	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Terbangunnya Infrastruktur yang Memadai	Indeks Infrastruktur	Angka	67
	Sasaran :			
2.1	Meningkatnya Infrastruktur Transportasi	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan	Angka	24,09
		Presentase Panjang Jalan dengan Kondisi Baik	Persen	69
2.2	Meningkatnya Layanan Air Minum Layak	Presentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak	Persen	73,20
3.	Tujuan :			
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	71,97
	Sasaran :			
3.1	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Angka	55,00
3.2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Angka	95,43
3.3	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	75,00
	<b>Misi 3 : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang mandiri Bertumpu pada Potensi SumberDaya Lokal</b>			
4	Tujuan :			
	Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,10
		Gini Ratio	Angka	0,330
	Sasaran :			
4.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Kontribusi Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Persen / Tahun	10,30
		Kontribusi Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Dan Perikanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Persen / Tahun	2



NO	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.2	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Berskala Nasional	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMA/PMDN)	Persen / Tahun	10
<b>Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Bersih, Demokratis dan Bebas KKN</b>				
5	Tujuan :			
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang berkualitas	Nilai Rata Rata Capaian Opini BPK, Nilai SAKIP, LPPD, Indeks Pelayanan Publik	Angka	83,5
Sasaran :				
5.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Zona	Kuning
5.2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih	Opini BPK	Opini	WTP
		Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat	BB
		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Angka	3,7
<b>Misi 5 : Mewujudkan Bolaang Mongondow sebagai Lumbung Pangan di Indonesia Bagian Timur</b>				
6	Tujuan :			
	Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	84,99
Sasaran :				
6.1	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Ketersediaan Pangan	Rasio Pangan	Angka	1,14

### B. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Misi 1 : Mewujudkan Bolaang Mongondow yang Berbudaya dan Berdaya Saing</b>						
1.	Tujuan :					
	Meningkatkan Mutu Pendidikan Dan Derajat Kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68,75	71,14 (BPS 2025)	103,47



NO	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Masyarakat yang berdaya Saing					
	Sasaran :					
1.1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Tahun	13,70	13,70 <i>(BPS 2025)</i>	100
1.2	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Semesta	Rata Rata Usia Harapan Hidup	Angka	69,65	70,31 <i>(BPS 2025)</i>	100.94
1.3	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Persen	6,75	7,74 <i>(BPS 2025)</i>	87,21
	<b>Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pembangunan yang berkeadilan Dan Berkelanjutan</b>					
2.	Tujuan :					
	Terbangunnya Infrastruktur yang Memadai	Indeks Infrastruktur	Angka	67	65 <i>*(Data Kementerian PUPR 2022)</i>	97,01
	Sasaran :					
2.1	Meningkatnya Infrastruktur Transportasi	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan	Angka	24,09	15,30	63,52
		Presentase Panjang Jalan dengan Kondisi Baik	Persen	69	56,51	81,90
2.2	Meningkatnya Layanan Air Minum Layak	Presentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak	Persen	73,20	68,63	93,76
3.	Tujuan :					
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	71,97	75,33 <i>*(Statistik Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2023)</i>	104,66
	Sasaran :					
3.1	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Angka	55,00	55,00	100



NO	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Angka	95,43	93,13	97,59
3.3	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	75,00	61,4	81,87
<b>Misi 3 : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang mandiri Bertumpu pada Potensi SumberDaya Lokal</b>						
4	Tujuan :					
	Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,10	5,33 <i>*(BPS 2025)</i>	104,50
		Gini Ratio	Angka	0,330	0,320 <i>*(Susenas 2024)</i>	96,96
Sasaran :						
4.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Kontribusi Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Persen / Tahun	10,30	6,95 <i>*(BPS 2025)</i>	59,91
		Kontribusi Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Dan Perikanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Persen / Tahun	2	6,85 <i>*(BPS 2025)</i>	342,5
4.2	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Berskala Nasional	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMA/PMDN)	Persen / Tahun	10	6,29	62,9
<b>Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Bersih, Demokratis dan Bebas KKN</b>						
5	Tujuan :					
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang berkualitas	Nilai Rata Rata Capaian Opini BPK, Nilai SAKIP, LPPD, Indeks Pelayanan Publik	Angka	83,5	80,53	96,44
Sasaran :						



NO	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Zona	Kuning (80)	Hijau (95,14)	119
5.2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih	Opini BPK	Opini	WTP (100)	WTP (100) *(Opini BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2023)	100
		Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat	BB (71)	B (65,35) *(Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024)	92,05
		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Angka	3,7	3,0561 *(Hasil Penilaian Dari Kemendagri Tahun 2023)	82,59
<b>Misi 5 : Mewujudkan Bolaang Mongondow sebagai Lumbung Pangan di Indonesia Bagian Timur</b>						
6	Tujuan :					
	Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	84,99	83,26 *(Indeks Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2023)	97,96
Sasaran :						
6.1	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Ketersediaan Pangan	Rasio Pangan	Angka	1,14	1,10	96,49

Sumber : Data Lkijp Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024

**C. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja serta capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

NO	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Misi 1 : Mewujudkan Bolaang Mongondow yang Berbudaya dan Berdaya Saing</b>						
1.	Tujuan :					





NO	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatkan Mutu Pendidikan Dan Derajat Kesehatan Masyarakat yang berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68,16	69,62	71,14 (BPS 2025)
	Sasaran :					
1.1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Tahun	13,30	11,63	13,70 (BPS 2025)
1.2	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Semesta	Rata Rata Usia Harapan Hidup	Angka	69,45	70,07	70,31 (BPS 2025)
1.3	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Persen	7,58	7,37	7,74 (BPS 2025)
	<b>Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pembangunan yang berkeadilan Dan Berkelanjutan</b>					
2.	Tujuan :					
	Terbangunnya Infrastruktur yang Memadai	Indeks Infrastruktur	Angka	65	65	65 *(Data Tahun 2023)
	Sasaran :					
2.1	Meningkatnya Infrastruktur Transportasi	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan	Angka	18	23,39	15,30
		Presentase Panjang Jalan dengan Kondisi Baik	Persen	65	67	56,51
2.2	Meningkatnya Layanan Air Minum Layak	Presentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak	Persen	70,17	92,94	68,63
3.	Tujuan :					
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	71,95	75,33	75,33 *(Statistik Kementerian Lingkungan



NO	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Hidup Tahun 2023)
	Sasaran :					
3.1	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Angka	44,55	50,00	55,00 (Lakip DLH)
3.2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Angka	95,43	95,87	93,13 (Lakip DLH)
3.3	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	74,90	75,72	61,4(Lakip DLH)
	<b>Misi 3 : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang mandiri Bertumpu pada Potensi SumberDaya Lokal</b>					
4	Tujuan :					
	Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,50	5,18	5,33 *(Bolmong Dalam Angka 2025)
		Gini Ratio	Angka	0,340	0,311	0,320 *(Susenas 2024)
	Sasaran :					
4.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Kontribusi Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Persen / Tahun	10,10	6,17	6,95 *(Bolmong Dalam Angka 2025)
		Kontribusi Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Dan Perikanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Persen / Tahun	1	3,18	6,85 *(Bolmong Dalam Angka 2025)
4.2	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Berskala Nasional	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMA/PMDN)	Persen / Tahun	10	7,24	6,29
	<b>Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Bersih, Demokratis dan Bebas KKN</b>					
5	Tujuan :					
	Meningkatkan Tata Kelola	Nilai Rata Rata Capaian Opini	Angka	-	65,66	80,53



NO	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang berkualitas	BPK, Nilai SAKIP, LPPD, Indeks Pelayanan Publik				
	Sasaran :					
5.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Zona	Merah (57,76)	Hijau (95,05)	Hijau (95,14)
5.2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih	Opini BPK	Opini	WTP 100	WTP (100)	WTP *(Opini BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2023)
		Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat	B	B (64,56)	B (65,35) *(Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023)
		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Angka	3,0528	3,0561	3,0561 *(Hasil Penilaian Dari Kemendagri Tahun 2023)
	<b>Misi 5 : Mewujudkan Bolaang Mongondow sebagai Lumbung Pangan di Indonesia Bagian Timur</b>					
6	Tujuan :					
	Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	84,89	83,26	83,26 *(Indeks Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2023)
	Sasaran :					
6.1	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Ketersediaan Pangan	Rasio Pangan	Angka	1,02	1,16	1,10 (Lakip DKP)

Sumber : Data Lkijp Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024



D. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

NO	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024			Target Akhir RPD 2023 - 2026	% Capaian Thp Target Akhir RPD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
<b>Misi 1 : Mewujudkan Bolaang Mongondow yang Berbudaya dan Berdaya Saing</b>							
1.	Tujuan :						
	Meningkatkan Mutu Pendidikan Dan Derajat Kesehatan Masyarakat yang berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	68,75	71,14	103,47	70,25	101.26
Sasaran :							
1.1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	13,70	13,70	100	14	97,86
1.2	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Semesta	Rata Rata Usia Harapan Hidup	69,65	70,31	100.94	70	100.45
1.3	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	6,75	7,74	87,21	5,75	74,29
<b>Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pembangunan yang berkeadilan Dan Berkelanjutan</b>							
2.	Tujuan :						
	Terbangunnya Infrastruktur yang Memadai	Indeks Infrastruktur	67	65 *(Data Tahun 2023)	97,01	70	92.85
Sasaran :							
2.1	Meningkatnya Infrastruktur Transportasi	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan	24,09	15,30	63,52	25,56	59,85
		Presentase Panjang Jalan dengan Kondisi Baik	69	56,51	81,90	73	77,41
2.2	Meningkatnya Layanan Air Minum Layak	Presentase Rumah Tangga	73,20	68,63	93,76	76,20	90.06



NO	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024			Target Akhir RPD 2023 - 2026	% Capaian Thp Target Akhir RPD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		Berakses Air Minum Layak					
3.	Tujuan :						
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,97	75,33 *(Statistik Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2023)	104,66	72,00	104,625
	Sasaran :						
3.1	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	55,00	55,00	100	60	91,66
3.2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	95,43	93,13	97,59	95,43	97,58
3.3	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	75,00	61,4	81,87	75,00	81,86
	<b>Misi 3 : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang mandiri Bertumpu pada Potensi SumberDaya Lokal</b>						
4	Tujuan :						
	Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	5,10	5,33 *(Bolmong Dalam Angka 2025)	104,50	6,15	86,66
		Gini Ratio	0,330	0,311 *(BPS Provinsi Sulawesi Utara 2024)	94,25	0,310	100,32
	Sasaran :						
4.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Kontribusi Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	10,30	6,95 *(Bolmong Dalam Angka 2025)	59,91	10,35	67,14
		Kontribusi Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Dan Perikanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	2	6,85 *(Bolmong Dalam Angka 2025)	342,5	3	228,33
4.2	Meningkatnya Daya Tarik Investasi	Persentase Peningkatan Nilai	10	6,29	62,9	10	62,9



NO	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024			Target Akhir RPD 2023 - 2026	% Capaian Thp Target Akhir RPD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	Berskala Nasional	Investasi (PMA/PMDN)					
<b>Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Bersih, Demokratis dan Bebas KKN</b>							
5	Tujuan :						
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang berkualitas	Nilai Rata Rata Capaian Opini BPK, Nilai SAKIP, LPPD, Indeks Pelayanan Publik	83,5	80,40	96,29	87,75	91,62
Sasaran :							
5.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Kuning	Hijau (95,14)	119	Hijau	105,71
5.2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih	Opini BPK	WTP	WTP *(Opini BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2023)	100	WTP	100
		Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	BB	B (65,35) *(Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023)	92,05	BB	92,04
		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,7	3,0561 *(Hasil Evaluasi Dari Kemendagri Tahun 2023)	82,59	3,9	78,46
<b>Misi 5 : Mewujudkan Bolaang Mongondow sebagai Lumbung Pangan di Indonesia Bagian Timur</b>							
6	Tujuan :						
	Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	84,99	83,26 *(Indeks Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2023)	97,96	85,15	97,78
Sasaran :							
6.1	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas	Rasio Pangan	1,14	1,10	96,49	1,2	91,66



NO	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024			Target Akhir RPD 2023 - 2026	% Capaian Thp Target Akhir RPD
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	Ketersediaan Pangan						

**E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya di kaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.**

Pengukuran kinerja terhadap Tujuan, indikator kinerja tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran yang telah dicapai di atas berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja Tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut :

**ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN 1**

Tujuan 1 Meningkatkan Mutu Pendidikan Dan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berdaya Saing				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,75	71,14	103,47

**Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dasarnya adalah pengukuran perbandingan dan harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua. IPM pada awalnya digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara berkembang atau negara terkebelakang dan juga mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk



mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Berdasarkan data yang tersedia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, IPM tercatat sebesar 68,95, meningkat menjadi 69,62 pada tahun 2023, dan mencapai 71,14 pada tahun 2024.

Peningkatan IPM ini dipengaruhi oleh tiga komponen utama:

1. **Angka Harapan Hidup:** Meningkat dari 69,78 tahun pada tahun 2022 menjadi 70,31 tahun pada tahun 2024.
2. **Rata-rata Lama Sekolah:** Meningkat dari 8,17 tahun pada tahun 2022 menjadi 8,36 tahun pada tahun 2024.
3. **Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan:** Meningkat dari 8.017.000 IDR pada tahun 2022 menjadi 8.358.000 IDR pada tahun 2024.

Peningkatan IPM ini mencerminkan perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow, terutama dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Komponen IPM	Indeks Pembangunan Manusia		
	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup (Tahun)	69.78	70.07	70.31
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8.17	8.36	8.38
Harapan lama Sekolah (Tahun)	11.61	11.63	11.65
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah)	10614	10915	11507
Indeks Pembangunan Manusia	68.95	69.62	71.14

**Penyebab Keberhasilan Peningkatan IPM:**





1. **Peningkatan Angka Harapan Hidup:** Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan berkontribusi pada peningkatan angka harapan hidup masyarakat.
2. **Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah:** Program pendidikan yang lebih baik dan peningkatan fasilitas pendidikan mendorong masyarakat untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.
3. **Peningkatan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan:** Pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan per kapita memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan lebih baik.

#### **Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja IPM:**

1. **Keterbatasan Infrastruktur:** Keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah terpencil, dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas.
2. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia:** Kurangnya tenaga pendidik dan tenaga medis yang berkualitas dapat memengaruhi kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
3. **Faktor Eksternal:** Kondisi ekonomi global, bencana alam, atau pandemi dapat memengaruhi perekonomian daerah dan berdampak pada indikator-indikator IPM.

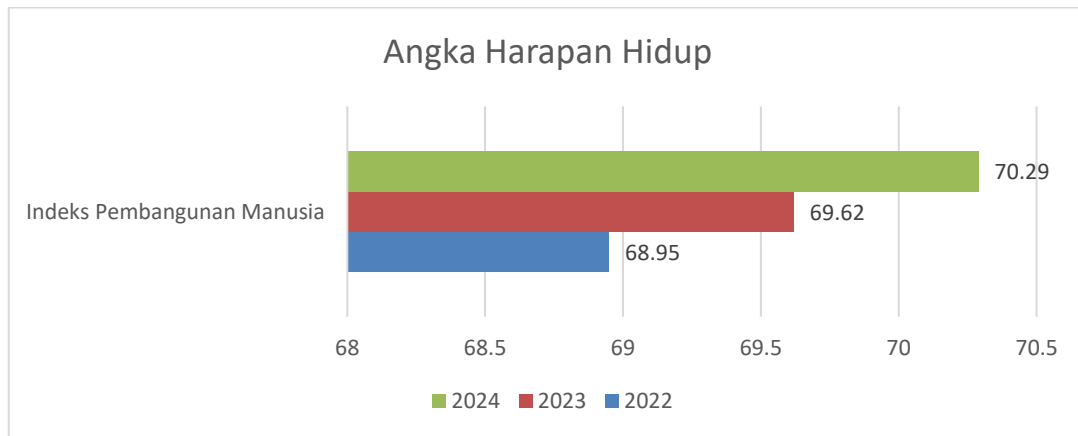
#### **Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:**

1. **Peningkatan Infrastruktur:** Pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya untuk memudahkan akses masyarakat.
2. **Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan:** Program pelatihan bagi tenaga pendidik dan medis, serta peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan.
3. **Diversifikasi Ekonomi:** Upaya diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor potensial, seperti pariwisata dan pertanian, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Meskipun terdapat tantangan, upaya-upaya tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai target-target pembangunan yang ditetapkan.



Dapat juga kita lihat dalam bentuk Grafik Berikut :



### ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 1 "Meningkatnya Akses Dan Kualitas Layanan Pendidikan"

Sasaran 1				
Meningkatnya Akses Dan Kualitas Layanan Pendidikan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pendidikan (Tahun)	13,70	13,70	100

#### Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan di bidang Pendidikan yang mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas sumber daya manusia yang tercermin didalamnya sangat menentukan tingkat produktivitas suatu bangsa. Indeks Pendidikan diukur dari kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang (dua pertiga) dan rata-rata Tahun bersekolah. Kemampuan baca-tulis orang dewasa tercermin dari data angka melek huruf (literacy rate) yaitu proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis (baik huruf latin maupun huruf lainnya). Rata-rata lama Sekolah (means-years of schooling) menunjukkan jenjang Pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun keatas. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya menggiat peduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah.



Indeks Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, Indeks Pendidikan tercatat sebesar 13,30, meningkat menjadi 13,50 pada tahun 2023, dan diperkirakan mencapai 13,70 pada tahun 2024.

#### **Penyebab Keberhasilan Peningkatan Indeks Pendidikan:**

1. **Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan:** Pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
2. **Program Pendidikan Inklusif:** Implementasi program pendidikan inklusif yang memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal, memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas.
3. **Peningkatan Anggaran Pendidikan:** Alokasi anggaran yang lebih besar untuk sektor pendidikan memungkinkan peningkatan fasilitas, penyediaan bahan ajar, dan pelatihan bagi tenaga pendidik.

#### **Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja Indeks Pendidikan:**

1. **Keterbatasan Infrastruktur Pendidikan:** Beberapa daerah terpencil masih mengalami keterbatasan fasilitas pendidikan yang memadai, seperti ruang kelas yang tidak memadai dan kekurangan tenaga pendidik.
2. **Tingkat Partisipasi Pendidikan yang Rendah:** Faktor ekonomi dan sosial dapat menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi pendidikan, terutama di kalangan keluarga kurang mampu.
3. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia:** Kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas dan distribusi yang tidak merata dapat memengaruhi kualitas pendidikan di beberapa daerah.

#### **Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:**

1. **Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur Pendidikan:** Pemerintah daerah telah membangun dan memperbaiki fasilitas



pendidikan, seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

2. **Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan:** Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk meningkatkan partisipasi dan prestasi pendidikan.
3. **Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pendidik:** Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam proses pembelajaran.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat terus meningkatkan Indeks Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow dan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

#### Perbandingan Realisasi Indeks Pendidikan Tahun 2022-2024

No	Indikator	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Indeks Pendidikan	11,53	11,63	13,70

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa secara rata-rata Indeks Pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar 0,10. Selama periode Tahun 2022-2023. Indeks Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan trend yang positif, yakni mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Rata-rata persentase peningkatan setiap tahunnya sebesar 0,10%. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2024 yakni sebesar 2,07%.



Grafik berikut menggambarkan capaian target dan realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.



## ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 2

**“Meningkatnya Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Semesta”**

<b>Sasaran 2</b>				
<b>Meningkatnya Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Semesta</b>				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Rata-Rata Usia Harapan Hidup (Angka)	69,65	70,31 (BPS)	100.94%

Rata - Rata Usia Harapan Hidup adalah rata-rata perkiraan atau ekspektasi dari usia bayi yang baru lahir mencapai kematiannya. Angka usia harapan hidup merupakan indikator kualitas kesehatan. Perhitungan capaian kinerja indikator **Usia Harapan Hidup (UHH) = (Jumlah semua Umur masing-masing yang meninggal / jumlah orang yang meninggal pada tahun itu)**

Indikator kinerja Angka Usia Harapan Hidup dengan target sebesar 69,65 Tahun 2024, capaian realisasi sebesar 70,31 Tahun 2023. Indikator ini mencapai target capaian realisasi sebesar 100.94%.

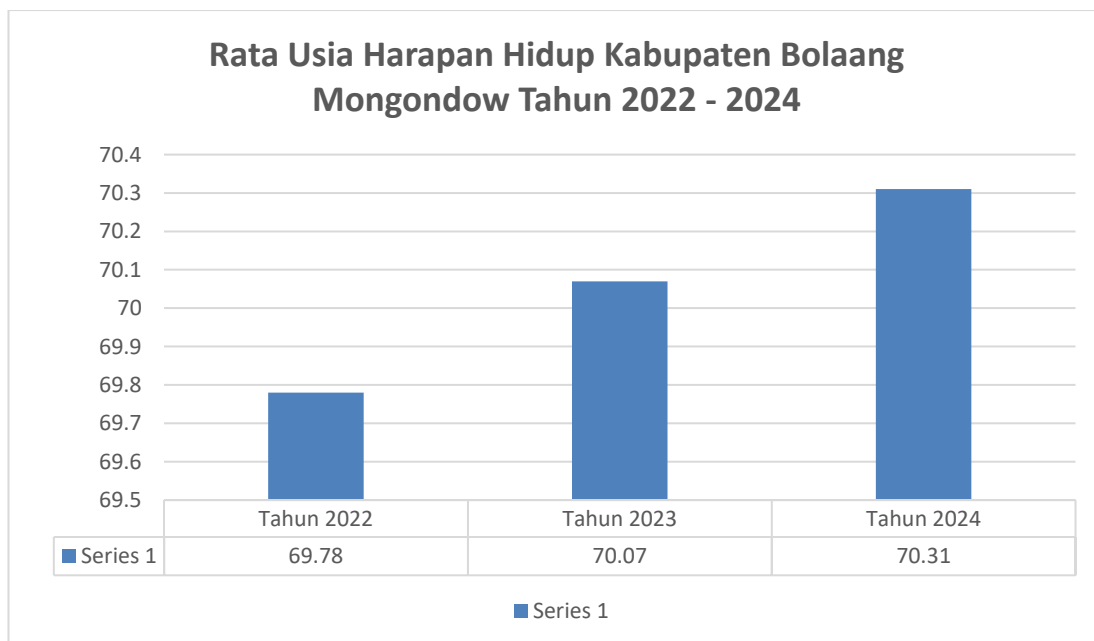
### Perbandingan Realisasi Rata-rata Usia Harapan



### Tahun 2022-2024

No	Indikator	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Rata-Rata Usia Harapan Hidup	69,78	70,07	70,31

Capaian kinerja angka usia harapan hidup dari tahun ke tahun mengalami trend peningkatan yang positif. Dimana angka usia harapan hidup tahun 2024 sebesar 70,31 meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,24 Tahun dari Angka Harapan hidup 70,07 tahun, dan dibandingkan Tahun 2022 dengan mengalami peningkatan 0,33 Tahun. Dapat juga kita lihat pada grafik berikut :



faktor keberhasilan atau kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan terkait Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024:

#### Faktor Penyebab Peningkatan AHH

Beberapa faktor yang dapat berkontribusi pada peningkatan AHH di Kabupaten Bolaang Mongondow meliputi:



- **Peningkatan Fasilitas Kesehatan:** Pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, serta penyediaan tenaga medis yang lebih berkualitas.
- **Program Kesehatan Masyarakat:** Adanya program imunisasi, penanggulangan penyakit menular, serta edukasi gizi dan kesehatan bagi masyarakat.
- **Akses Air Bersih dan Sanitasi:** Perbaikan dalam akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang lebih baik mengurangi risiko penyakit menular.
- **Kesadaran Masyarakat akan Pola Hidup Sehat:** Kampanye dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga kesehatan dalam meningkatkan pola hidup sehat masyarakat.
- **Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan:** Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, akses terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan semakin baik.

#### **Faktor Penyebab Penurunan AHH**

Beberapa kendala yang dapat menyebabkan penurunan AHH, antara lain:

- **Kurangnya Infrastruktur Kesehatan di Daerah Terpencil:** Keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah pelosok menyebabkan keterlambatan dalam penanganan medis.
- **Penyebaran Penyakit Menular:** Meningkatnya kasus penyakit seperti TBC, malaria, atau infeksi pernapasan akibat lingkungan yang kurang sehat.
- **Gaya Hidup Tidak Sehat:** Kebiasaan merokok, pola makan tidak sehat, serta rendahnya aktivitas fisik dapat memengaruhi tingkat kesehatan masyarakat.
- **Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial:** Masyarakat yang masih berada dalam garis kemiskinan sulit mendapatkan layanan kesehatan berkualitas.
- **Dampak Perubahan Iklim:** Bencana alam, polusi, dan degradasi lingkungan dapat menyebabkan meningkatnya penyakit dan kematian dini.



### **Alternatif Solusi yang Dilakukan**

Untuk mengatasi tantangan yang ada, pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow telah menerapkan beberapa solusi:

- **Peningkatan Infrastruktur Kesehatan:** Pembangunan puskesmas dan rumah sakit baru, terutama di wilayah pedesaan.
- **Program Asuransi Kesehatan Gratis:** Pemerintah daerah bekerja sama dengan BPJS untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih terjangkau bagi masyarakat kurang mampu.
- **Peningkatan Kualitas Gizi:** Program pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil guna mengurangi angka kematian bayi serta meningkatkan kesehatan ibu.
- **Kampanye Gaya Hidup Sehat:** Penyuluhan dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga, pola makan sehat, serta pengurangan konsumsi rokok dan alkohol.
- **Revitalisasi Program Posyandu:** Peningkatan peran posyandu dalam memberikan layanan kesehatan bagi ibu dan anak.
- **Pengelolaan Lingkungan yang Lebih Baik:** Program penghijauan, penyediaan akses air bersih, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan.

### **Kesimpulan**

AHH di Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan tren positif dengan adanya berbagai program peningkatan kesehatan. Namun, masih terdapat tantangan dalam penyediaan layanan kesehatan di daerah terpencil, ketimpangan ekonomi, serta ancaman penyakit menular. Dengan solusi yang telah dilakukan, diharapkan AHH terus meningkat sehingga kualitas hidup masyarakat semakin baik.

### **Pebandingan Capaian Angka Usia Harapan Hidup Kab.Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Dan Nasional**





Tahun	Target Angka Usia Harapan Hidup Bolaang Mongondow	Capaian Angka Usia Harapan Hidup Bolaang Mongondow	Angka Usia Harapan Hidup Sulawesi Utara	Angka Usia Harapan Hidup Nasional
2022	69,85	69,78	72.08	71,85
2023	70,07	70,14	72.08	71,85
2024	70,31	70,24	72.18	71,95

### ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 3 “MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN”

Sasaran 3 Menurunnya Angka Kemesikinan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Kemiskinan	6,75	7,74 (BPS)	87,21%

Kemiskinan menjadi faktor yang terus diupayakan sebagai salah satu indikator pembangunan. Terdapat 5 (lima) indikator kemiskinan yang menjadi perhatian dalam melihat angka kemiskinan. Hal tersebut yakni Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan kemiskinan serta garis kemiskinan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2024 adalah 7,74%, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 20,19 ribu jiwa.

#### Analisis Penyebab Penurunan Angka Kemiskinan:

1. **Peningkatan Akses Permodalan:** Kolaborasi dengan PT. Permodalan Nasional Madani pada tahun 2024 telah menyasar 441 nasabah di delapan kabupaten/kota, termasuk Bolaang Mongondow. Program ini memberikan akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil, membantu masyarakat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.



2. **Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan:** Rapat Koordinasi Daerah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) telah dilaksanakan untuk menyinkronkan program penanggulangan kemiskinan dan memantau implementasi rencana aksi di bidang kemiskinan. Langkah ini memastikan efektivitas program dan kebijakan yang diterapkan.
3. **Program Bantuan Sosial:** Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow telah mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk program bantuan sosial, termasuk bantuan langsung tunai dan program padat karya. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi beban ekonomi keluarga miskin.

#### **Tantangan yang Dihadapi:**

1. **Penyebaran Kemiskinan di Daerah Terpencil:** Keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur di wilayah terpencil menyulitkan distribusi bantuan dan pelaksanaan program secara merata.
2. **Keterbatasan Sumber Daya:** Anggaran yang terbatas membatasi cakupan dan skala program penanggulangan kemiskinan yang dapat dilaksanakan.

#### **Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:**

1. **Pemberdayaan Ekonomi Lokal:** Pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro melalui pelatihan dan bantuan peralatan telah dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.
2. **Kemitraan dengan Sektor Swasta:** Kerja sama dengan perusahaan swasta dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
3. **Digitalisasi Layanan:** Pemanfaatan teknologi informasi untuk pendataan dan penyaluran bantuan sosial guna memastikan ketepatan sasaran dan efisiensi proses.

**Kesimpulan:** Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2024 merupakan hasil dari berbagai upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan sumber daya masih perlu diatasi melalui inovasi dan kerja sama yang lebih intensif untuk mencapai target pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

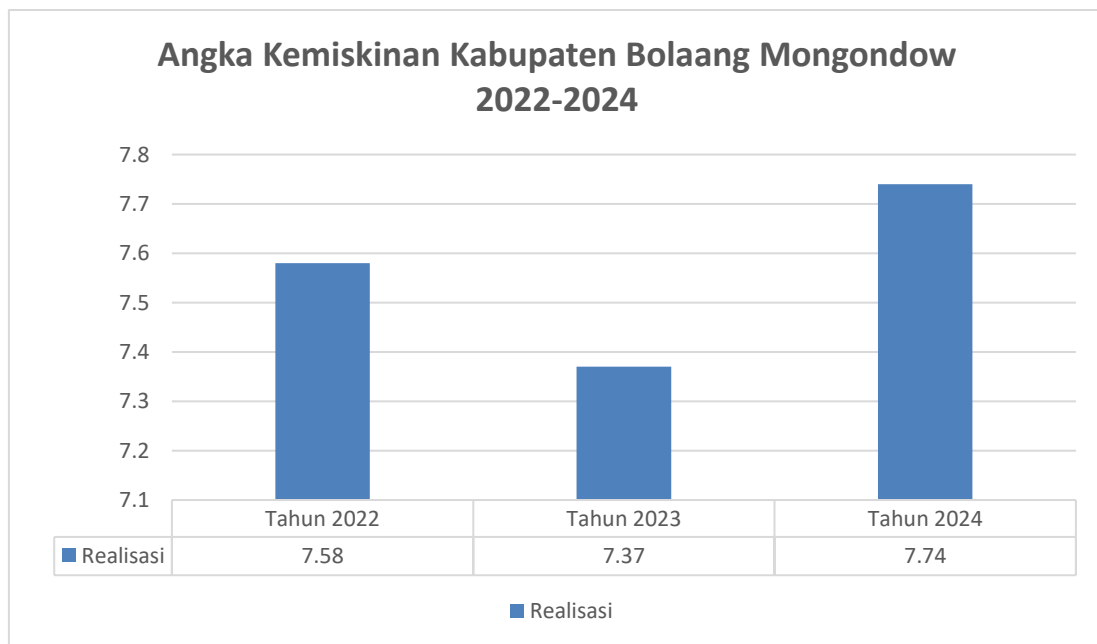
### **Perbandingan Realisasi Indikator Angka Kemiskinan Tahun 2021-2023**



No	Indikator	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Angka Kemiskinan	7,58	7.37	7.74

Sumber : BPS Bolaang Mongondow Tahun 2025

Jika dilihat dari Angka Kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow, pada tahun 2022 angka kemiskinan sebesar 7,58 persen atau berkurang hingga mencapai 0,21 Persen dibanding tahun 2023 yang mencapai 7,37 persen. Pada tahun 2024 persentase penduduk miskin naik menjadi 7,74 atau naik 0,37 Persen. Hal ini dipengaruhi meningkatnya jumlah penduduk miskin dari 19,02 ribu jiwa di tahun 2023 dan naik menjadi 20,19 ribu jiwa di tahun 2024.



## ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN 2

Tujuan 2 Terbangunnya Infrastruktur Yang Memadai				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Infrastruktur	67	65 *(Data Tahun 2023)	97,01



Pembangunan infrastruktur secara masif dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia digagas guna memastikan terjaminnya ketersediaan infrastruktur agar dapat menjadi lompatan bagi Indonesia untuk menuju negara maju, sekaligus dapat lepas dari perangkap sebagai negara berkembang saja atau “*middle income trap*”.

Urgensi keberlanjutan pembangunan infrastruktur semakin dirasakan ditengah meningkat tajamnya persaingan ekonomi antar kawasan, karena dengan membangun infrastruktur sejatinya adalah membangun masa depan sebuah peradaban, karena dapat berperan sebagai stimulus Bergeraknya Kabupaten Bolaang Mongondow aktivitas ekonomi. Melalui percepatan pembangunan infrastruktur secara lebih merata di seluruh tanah air, kita tentunya berharap dapat tercipta konektivitas yang kuat antarwilayah, menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memupus kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan daya saing dan stimulus pertumbuhan ekonomi guna mencapai negara maju.

Tabel di bawah memuat data Capaian Indeks Infrastruktur 3 tahun terakhir dimana untuk tahun 2024 realisasi nilai Indeks Infrastruktur Kabupaten Bolaang Mongondow masih Mengacu Data Tahun 2023 yaitu berada di Angka 65 dengan Capaian Kinerja sebesar 97.01%. Bila dibandingkan dengan persentase capaian pada Tahun 2022, Indeks Infrastruktur Kabupaten Bolaang Mongondow Masih sama yaitu berada di Angka 65. Hal ini disebabkan semenjak Tahun 2022 - 2024 Kementerian PUPR belum merilis Indeks Infrastruktur untuk Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
----	-------------------	----------------	------------	------------



1	Indeks Infrastruktur(%)	65	65	65
---	-------------------------	----	----	----

Analisis terhadap kinerja infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan adanya upaya signifikan dalam meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur. Pembangunan Bendungan Lolak, misalnya, dengan kapasitas 16 juta meter kubik, bertujuan mengairi 2.200 hektare lahan pertanian dan mengurangi risiko banjir hingga 29% di wilayah sekitar

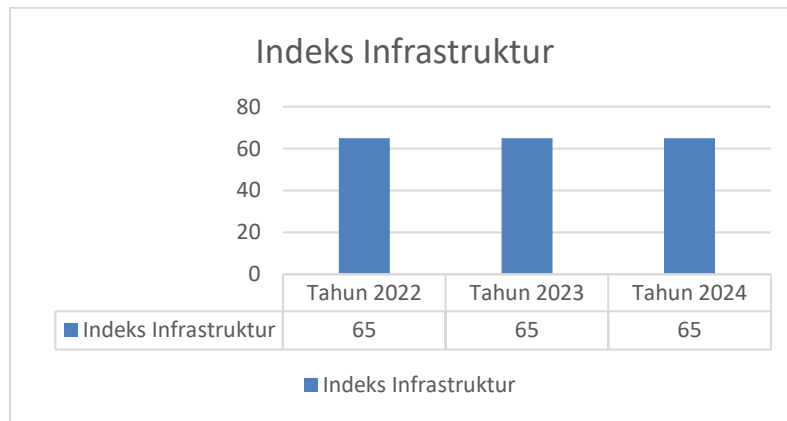
Selain itu, peresmian Instruksi Jalan Daerah (IJD) oleh Presiden Jokowi diharapkan dapat memperbaiki infrastruktur jalan di seluruh Provinsi Sulawesi Utara, termasuk Kabupaten Bolaang Mongondow

Namun, evaluasi terhadap kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) di Kecamatan Bolaang Timur menunjukkan bahwa meskipun tahapan pelaksanaan pembangunan telah diikuti dan masyarakat diberdayakan melalui Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), serta Kelompok Desa (KD), masih terdapat kendala dalam efektivitas pelaksanaan.

Kinerja kepala desa dalam aspek komunikasi, tanggung jawab, keaktifan pemimpin, dan motivasi juga ditemukan masih rendah, yang dapat menghambat pembangunan infrastruktur desa

Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa solusi alternatif telah diterapkan, seperti pengoperasian tiga infrastruktur kelistrikan oleh PLN yang meningkatkan keandalan pasokan listrik dan membuka peluang investasi di wilayah Bolaang Mongondow Selatan . Selain itu, peningkatan peran fasilitator masyarakat dalam membimbing dan mengarahkan OMS, KD, dan KPP mulai dari tahap penyiapan hingga pelaporan dan penyerahan infrastruktur yang dibangun kepada KPP dan pemerintah desa juga telah dilakukan

Secara keseluruhan, meskipun terdapat upaya signifikan dalam meningkatkan infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow, masih diperlukan perbaikan dalam aspek komunikasi dan tanggung jawab aparatur desa untuk mencapai kinerja yang optimal.



#### ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 4 “Meningkatnya Infrastruktur Transportasi”

Sasaran 4 Meningkatnya Infrastruktur Transportasi				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Kendaraan (Angka)	24,09	15,30	63,52
2	Persentase Panjang Jalan Dengan Kondisi Baik (%)	69	56,51	81,90

##### Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Kendaraan (Angka)

Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor.

Indikator Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun 2024 dari target 24,09 terealisasi 15,30 dengan Capaian 63,52%. Adanya penurunan Capaian jika dibandingkan dengan Tahun 2023 dimana tercatat Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan terealisasi di Angka 23.39.

Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan



kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

Rasio ini menunjukkan adanya tren peningkatan yang positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang berarti bahwa panjang jalan yang tersedia relatif lebih besar dibandingkan jumlah kendaraan bermotor.

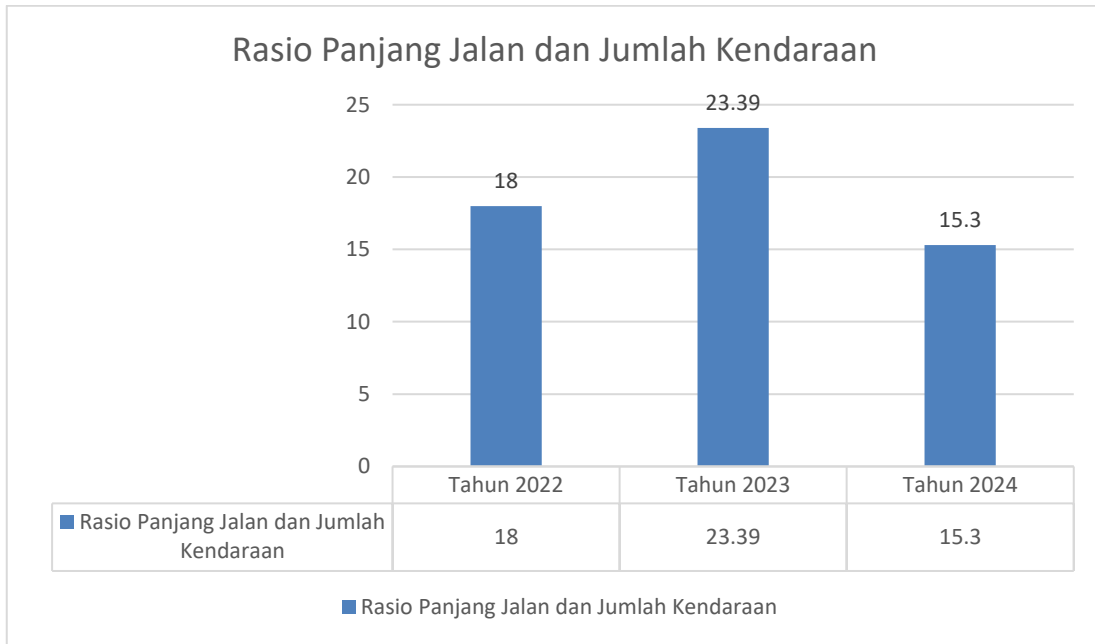
**Penyebab Peningkatan Kinerja:**

1. **Peningkatan Panjang Jalan:** Pemerintah daerah telah melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, sehingga total panjang jalan mengalami peningkatan.
2. **Pengendalian Pertumbuhan Kendaraan:** Adanya kebijakan yang efektif dalam mengatur pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, seperti regulasi kepemilikan kendaraan dan peningkatan layanan transportasi umum, membantu menjaga keseimbangan antara panjang jalan dan jumlah kendaraan.

**Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:**

1. **Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan:** Pemerintah daerah fokus pada pembangunan jalan baru serta pemeliharaan jalan yang ada untuk memastikan kelayakan dan keamanan infrastruktur jalan.
2. **Pengembangan Transportasi Publik:** Upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi umum dilakukan guna mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi.
3. **Kebijakan Pembatasan Kendaraan:** Implementasi kebijakan seperti pembatasan usia kendaraan dan peningkatan pajak kendaraan mewah untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor.

Dengan langkah-langkah tersebut, Kabupaten Bolaang Mongondow berhasil meningkatkan rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan, yang berkontribusi pada kelancaran lalu lintas dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.



### Persentase Panjang Jalan Dengan Kondisi Baik (%)

Pada tahun 2024, Kabupaten Bolaang Mongondow mencatat peningkatan persentase panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 56.51%. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan bahwa panjang jalan dalam kondisi baik meningkat dari 456,54 km pada tahun 2021 menjadi 568,58 km pada tahun 2023.

#### Penyebab Peningkatan Kinerja:

- Implementasi Instruksi Jalan Daerah (IJD):** Pada tahun 2024, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp183 miliar untuk peningkatan kondisi jalan sepanjang 59 km di Provinsi Sulawesi Utara, termasuk Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Pembangunan Infrastruktur Strategis:** Pembangunan Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow tidak hanya berfungsi sebagai irigasi, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, yang mendorong perbaikan kondisi jalan di sekitarnya.

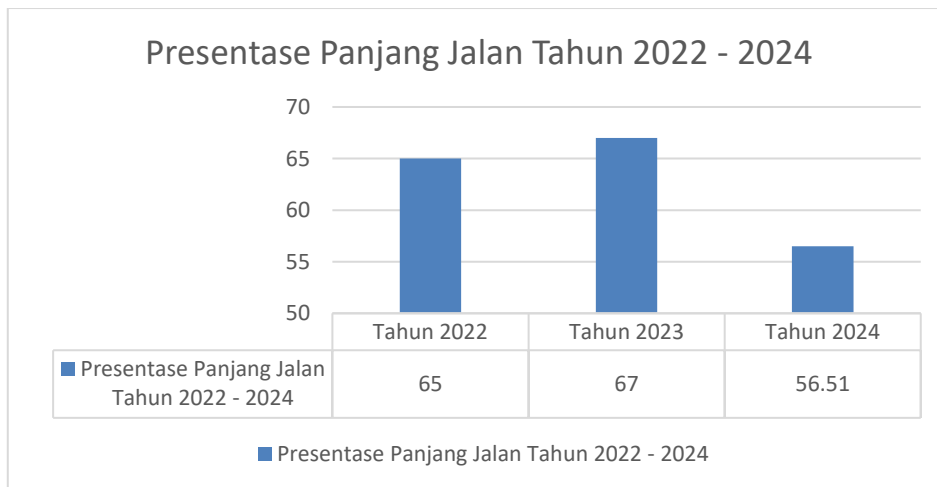




### Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

1. **Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat:** Pemerintah daerah aktif berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan anggaran dan teknis dalam perbaikan infrastruktur jalan melalui program seperti IJD.
2. **Pemeliharaan Rutin dan Rehabilitasi:** Pelaksanaan program pemeliharaan rutin dan rehabilitasi jalan secara berkala untuk memastikan jalan tetap dalam kondisi baik.
3. **Pengembangan Infrastruktur Pendukung:** Pembangunan infrastruktur pendukung seperti drainase yang baik untuk mencegah kerusakan jalan akibat genangan air atau banjir.

Dengan upaya-upaya tersebut, Kabupaten Bolaang Mongondow berhasil meningkatkan persentase panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2024, yang berdampak positif pada mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.



### ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 5 "Meningkatnya Layanan Air Minum Layak"

Sasaran 5 Meningkatnya Layanan Air Minum Layak				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak	73,20	68,63	93,76



	(%)			
--	-----	--	--	--

Pada tahun 2024, Kabupaten Bolaang Mongondow menargetkan peningkatan persentase rumah tangga dengan akses air minum layak menjadi 73,20% terealisasi 68,63% dengan Capaian Kinerja 93,76%.

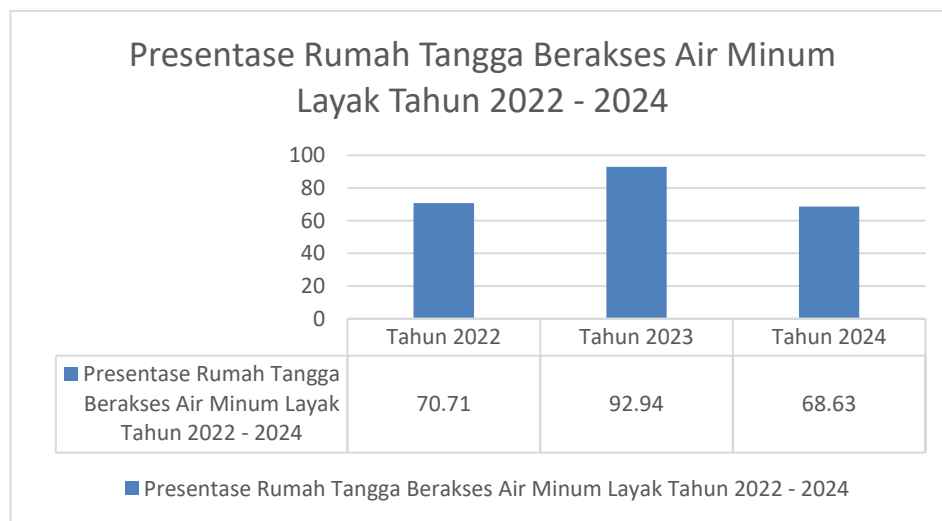
**Penyebab Peningkatan Kinerja:**

1. **Implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) AMPL:** Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow telah menyusun RAD untuk periode 2017-2022, yang berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah dalam memperluas program pelayanan air minum dan sanitasi.
2. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum:** Melalui program ini, pemerintah daerah fokus pada pengelolaan sumber daya air dan pengembangan sistem penyediaan air minum untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum layak.

**Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:**

1. **Pengembangan Infrastruktur Air Minum:** Pemerintah daerah melakukan pembangunan dan pemeliharaan jaringan air minum untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
2. **Peningkatan Kualitas Layanan Air Minum:** Upaya peningkatan kualitas layanan dilakukan melalui pengelolaan sumber daya air yang lebih baik dan pengembangan sistem penyediaan air minum yang efisien.
3. **Kolaborasi dengan Berbagai Pihak:** Pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta, untuk mendukung program penyediaan air minum dan sanitasi.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan persentase rumah tangga dengan akses air minum layak di Kabupaten Bolaang Mongondow dapat mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.



### ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN 3 "MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP"

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,97	*75,33 (Statistik Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2023)	104,66

Pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh - sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Pengukuran kualitas lingkungan secara umum dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai



kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya.

Salah satu cara untuk mereduksi banyak data dan informasi adalah dengan menggunakan indeks. Pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dengan target Nilai Indeks 71,97 terealisasi sebesar 75,33. Nilai Indeks tersebut masih mengacu Pada Nilai Indeks IKLH Tahun 2023 yang mana lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2022 yaitu 71,95% dengan kinerja sebesar 89,93% atas target yang sama yakni 80%. Hal ini disebabkan Kementerian Lingkungan Hidup belum merilis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024.

Pada tahun 2024, Kabupaten Bolaang Mongondow menargetkan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja lingkungan hidup serta alternatif solusi yang telah dan dapat diterapkan dapat memberikan gambaran mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

#### **Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja:**

1. Penyusunan Kebijakan dan Rencana Strategis:
  - Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) tahun 2023-2026, yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum layak dan sanitasi yang baik.
2. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat:
  - Melalui program edukasi dan sosialisasi, masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Pengembangan Infrastruktur Hijau:
  - Upaya pengembangan konsep kota hijau telah diterapkan, meskipun masih perlu ditingkatkan. Penelitian menunjukkan



bahwa penerapan kota hijau di Kabupaten Bolaang Mongondow mencapai 46,5%, yang berada di bawah rata-rata.

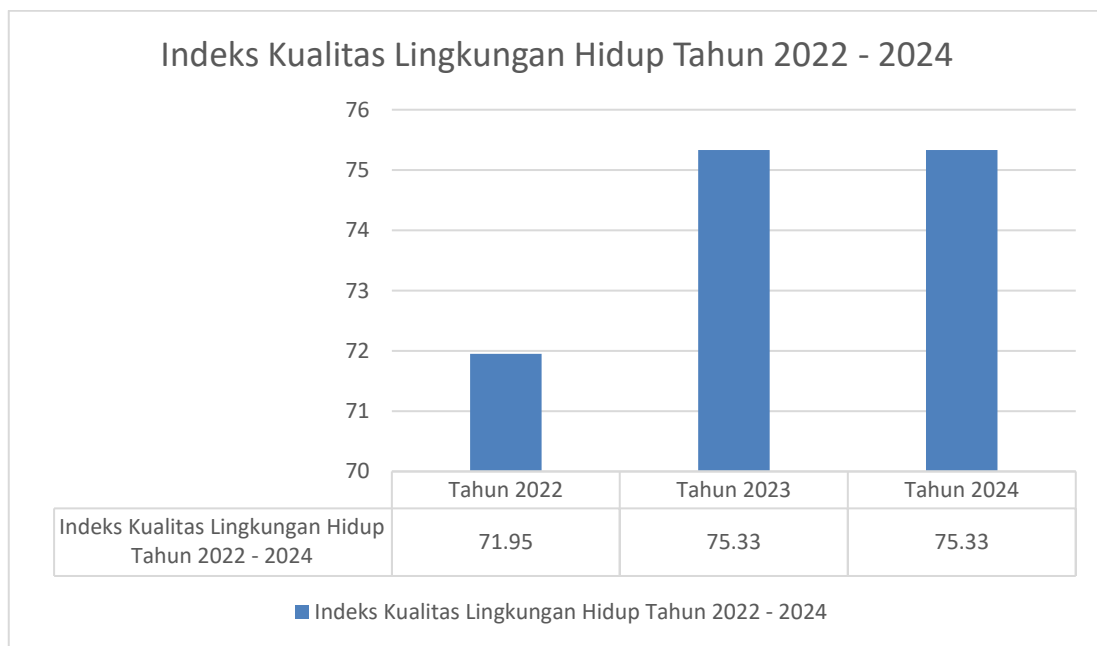
**Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja:**

1. Keterbatasan Data dan Informasi:
  - Kurangnya data terkini mengenai IKLH menyulitkan evaluasi dan perencanaan program lingkungan yang efektif.
2. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan:
  - Meskipun kebijakan telah disusun, pelaksanaan di lapangan sering menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar instansi.

**Alternatif Solusi yang Telah dan Dapat Dilakukan:**

1. Penguatan Kapasitas Institusi:
  - Meningkatkan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif.
2. Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Lingkungan:
  - Membangun dan memelihara infrastruktur pengelolaan sampah dan limbah untuk mencegah pencemaran lingkungan.
3. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan:
  - Bekerja sama dengan sektor swasta, komunitas, dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan program lingkungan yang berkelanjutan.
4. Pemantauan dan Evaluasi Berkala:
  - Melakukan pemantauan rutin terhadap indikator lingkungan dan mengevaluasi efektivitas program untuk perbaikan berkelanjutan.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kabupaten Bolaang Mongondow dapat mencapai target IKLH yang lebih baik di masa mendatang, sehingga menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat.



### ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 6 “MENINGKATNYA KUALITAS AIR”

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Air	55,00	55,00	100%

Capaian indikator Indeks Kualitas Air berdasarkan Tabel diatas Pada beberapa Tahun Terakhir. Pada Tahun 2024 dari perhitungan Indeks Kualitas Air pada tahun 2024 Dari Target 55 terealisasi sebesar 55 dengan Capaian Kinerja Tahun 2024 adalah 100% dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2023 sebesar 50. Indikator Indeks Kualitas Air Meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 5%. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan kualitas air di tahun 2024, penurunan yang signifikan dimana terdapat alih fungsi lahan menjadi pertambangan illegal.

Pada tahun 2024, Kabupaten Bolaang Mongondow menargetkan peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA) sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kualitas air serta alternatif solusi yang telah dan



dapat diterapkan dapat memberikan gambaran mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

#### **Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja:**

##### **1. Penyusunan Kebijakan dan Rencana Strategis:**

- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow telah menetapkan indikator kinerja utama untuk tahun 2024, termasuk target peningkatan kualitas air.

##### **2. Pengendalian Pencemaran Air:**

- Penerapan program pengendalian pencemaran air melalui pengawasan terhadap kegiatan industri dan pertambangan yang berpotensi mencemari sumber air.

##### **3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat:**

- Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan sumber air dan dampak negatif dari pencemaran air.

#### **Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja:**

##### **1. Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI):**

- Kegiatan PETI di wilayah Bolaang Mongondow Timur telah menyebabkan penurunan kualitas air sungai akibat limbah merkuri dan bahan kimia berbahaya lainnya.

##### **2. Kurangnya Infrastruktur Pengelolaan Limbah:**

- Keterbatasan fasilitas pengelolaan limbah domestik dan industri menyebabkan limbah langsung dibuang ke badan air tanpa pengolahan yang memadai.

##### **3. Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Lemah:**

- Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, seperti pembuangan limbah ilegal, berkontribusi pada penurunan kualitas air.

#### **Alternatif Solusi yang Telah dan Dapat Dilakukan:**

##### **1. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum:**

- Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas yang mencemari sumber air, termasuk penertiban PETI dan industri yang tidak memenuhi standar lingkungan.



## 2. Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Limbah:

- o Membangun dan mengoptimalkan fasilitas pengolahan limbah domestik dan industri untuk mencegah pencemaran sumber air.

## 3. Rehabilitasi Ekosistem Sungai:

- o Melakukan program rehabilitasi dan konservasi ekosistem sungai yang telah terdegradasi akibat aktivitas manusia.

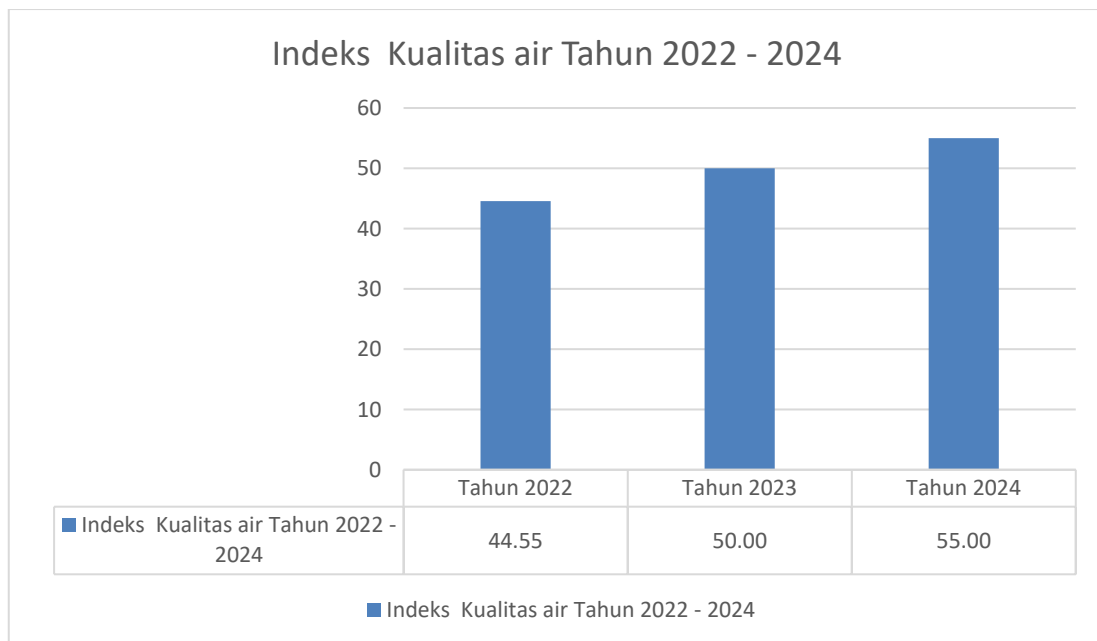
## 4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat:

- o Mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dan melaporkan aktivitas yang berpotensi mencemari sumber air.

## 5. Kerjasama Antar Sektor:

- o Membangun kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam upaya pengelolaan kualitas air yang berkelanjutan.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kabupaten Bolaang Mongondow dapat mencapai target peningkatan Indeks Kualitas Air pada tahun 2024, sehingga mendukung kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.



## ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 7 “MENINGKATNYA KUALITAS UDARA”





No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Udara	95,43	93,13	97,59

Pada tahun 2024, Kabupaten Bolaang Mongondow menetapkan target Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 95,43 terealisasi 93,13 dengan Capaian Kinerja sebesar 97,59%. Adanya Penurunan dibandingkan dengan Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 95,87. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas udara.

**Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja:**

**1. Implementasi Kebijakan dan Program Lingkungan:**

- o Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow telah menetapkan indikator kinerja utama untuk tahun 2024, termasuk target peningkatan kualitas udara.

**2. Pengendalian Emisi dari Sumber Industri dan Transportasi:**

- o Pengawasan terhadap industri dan sektor transportasi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar emisi yang ditetapkan.

**3. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH):**

- o Penambahan dan pemeliharaan RTH di wilayah perkotaan dan pedesaan untuk meningkatkan kualitas udara melalui penyerapan polutan oleh vegetasi.

**Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja:**

**1. Kebakaran Hutan dan Lahan:**

- o Kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan peningkatan polusi udara yang signifikan, terutama selama musim kemarau.

**2. Aktivitas Pertambangan dan Industri Tanpa Pengendalian yang Memadai:**

- o Kegiatan pertambangan dan industri yang tidak menerapkan teknologi pengendalian emisi dapat meningkatkan polusi udara.

**3. Pertumbuhan Kendaraan Bermotor:**

- o Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tanpa disertai pengendalian emisi yang efektif dapat menurunkan kualitas udara.



### Alternatif Solusi yang Telah dan Dapat Dilakukan:

#### 1. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum:

- o Memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap industri dan sektor transportasi yang melanggar standar emisi.

#### 2. Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan:

- o Mendorong penggunaan transportasi umum dan kendaraan ramah lingkungan untuk mengurangi emisi dari sektor transportasi.

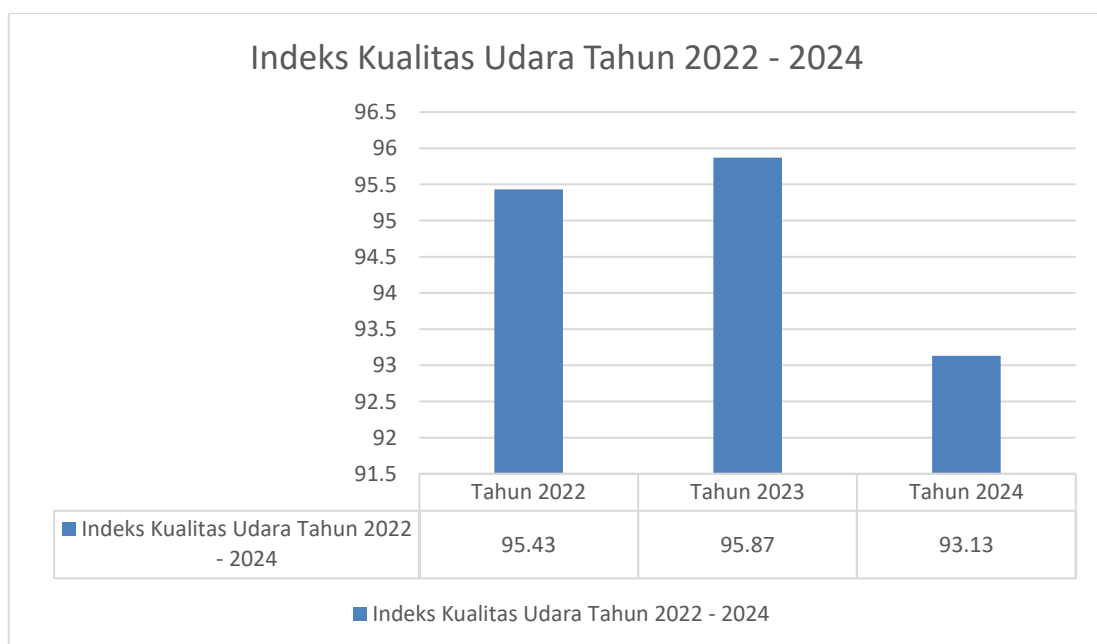
#### 3. Edukasi dan Partisipasi Masyarakat:

- o Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas udara dan mendorong partisipasi dalam program penghijauan.

#### 4. Pengembangan Sistem Pemantauan Kualitas Udara:

- o Membangun sistem pemantauan kualitas udara yang beroperasi secara kontinu untuk mendeteksi dan menanggulangi pencemaran udara secara efektif.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kabupaten Bolaang Mongondow dapat mencapai target Indeks Kualitas Udara yang telah ditetapkan pada tahun 2024, sehingga menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat.





### ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 8 “MENINGKATNYA KUALITAS TUTUPAN LAHAN”

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	75,00	61,4	81,87

Pada tahun 2024, Kabupaten Bolaang Mongondow menargetkan peningkatan Indeks Tutupan Lahan (ITL) menjadi 75,00 dengan realisasi 61,4 capaian kinerja 81,87%, capai tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tutupan lahan serta alternatif solusi yang telah dan dapat diterapkan dapat memberikan gambaran mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

#### Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja:

##### 1. Implementasi Kebijakan dan Rencana Strategis:

- o Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow telah menetapkan indikator kinerja utama untuk tahun 2024, termasuk target peningkatan kualitas tutupan lahan.

##### 2. Pengelolaan Lahan Berbasis Konservasi:

- o Penerapan praktik pengelolaan lahan yang berkelanjutan, seperti agroforestri dan reboisasi, membantu meningkatkan kualitas tutupan lahan.

##### 3. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat:

- o Edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga tutupan lahan telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program konservasi.

#### Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja:



**1. Alih Fungsi Lahan:**

- Perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi lahan terbangun di Kecamatan Lolak menunjukkan adanya alih fungsi lahan yang dapat menurunkan kualitas tutupan lahan.

**2. Kebakaran Hutan dan Lahan:**

- Kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan degradasi tutupan lahan dan menurunkan kualitas lingkungan.

**3. Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI):**

- Kegiatan PETI di wilayah Bolaang Mongondow Timur telah menyebabkan degradasi lahan dan penurunan kualitas tutupan lahan.

**Alternatif Solusi yang Telah dan Dapat Dilakukan:**

**1. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum:**

- Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas yang menyebabkan degradasi lahan, seperti alih fungsi lahan ilegal dan PETI.

**2. Rehabilitasi dan Reforestasi:**

- Melakukan program rehabilitasi lahan kritis dan reforestasi untuk memulihkan tutupan lahan yang telah terdegradasi.

**3. Pengembangan Pertanian Berkelanjutan:**

- Mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan untuk mencegah degradasi lahan dan menjaga kualitas tutupan lahan.

**4. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat:**

- Mengadakan pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

**5. Kolaborasi Antar Sektor:**

- Membangun kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam upaya konservasi dan peningkatan kualitas tutupan lahan.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kabupaten Bolaang Mongondow dapat mencapai target ITL yang lebih baik di masa



mendatang, sehingga menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat.



#### ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN 4

##### *“MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI”*

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,10	5,33 *(Bolmong Dalam Angka 2025)	104,50
2	Gino Ratio	0,330	0,311 *(BPS Provinsi Sulawesi Utara 2024)	94,25

#### Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara/daerah secara berkesinambungan



menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Analisis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai sektor ekonomi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha selama periode 2022-2024 menunjukkan variasi antar sektor.

Berdasarkan tabel Tujuan **Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi**, dengan indikator tujuan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024, dengan Target 5,10 terealisasi 5,33 dengan Capaian Kinerja 104,50%. Dibandingkan dengan Tahun 2023 adanya Peningkatan Pertumbuhan ekonomi sebesar 0,15. Selanjutnya dibandingkan dengan Tahun 2022, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow dibandingkan dengan Tahun 2023 mencapai 0,68% dengan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,35.

Berikut adalah analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow selama periode 2022-2024, termasuk penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dan dapat dilakukan:

#### 1. Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja Ekonomi:

- **Pemulihan Pasca Pandemi COVID-19**

Pemulihan dari dampak pandemi telah mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor, terutama industri dan perdagangan.

- **Sektor Pertambangan dan Penggalan**

Sektor ini tetap menjadi kontributor utama dalam perekonomian daerah, terutama dengan meningkatnya permintaan komoditas tambang.



- **Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**  
Upaya peningkatan produksi dan modernisasi di sektor pertanian dan perikanan berkontribusi terhadap peningkatan PDRB.
- **Peningkatan Investasi Infrastruktur**  
Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya telah mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan jasa.

## 2. Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja Ekonomi:

- **Ketergantungan pada Sektor Tertentu**  
Ketergantungan pada sektor pertambangan membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.
- **Fluktuasi di Sektor Pertanian**  
Ketidakpastian iklim dan kurangnya teknologi pertanian modern menyebabkan ketidakstabilan produksi.
- **Terbatasnya Infrastruktur dan Aksesibilitas**  
Beberapa daerah masih mengalami keterbatasan akses jalan dan transportasi, menghambat distribusi barang dan jasa.

## 3. Alternatif Solusi yang Telah dan Dapat Dilakukan:

- **Diversifikasi Ekonomi**  
Mengembangkan sektor pariwisata, industri kreatif, dan jasa agar tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan.
- **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**  
Mengadakan pelatihan dan pendidikan vokasional untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal.
- **Pengembangan Infrastruktur**  
Mempercepat pembangunan jalan, jaringan listrik, dan akses telekomunikasi untuk mendukung aktivitas ekonomi.
- **Peningkatan Investasi**  
Meningkatkan daya tarik investasi dengan penyederhanaan regulasi dan pemberian insentif bagi investor.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow dapat lebih stabil dan berkelanjutan hingga tahun 2024 dan seterusnya.



### Gini Ratio

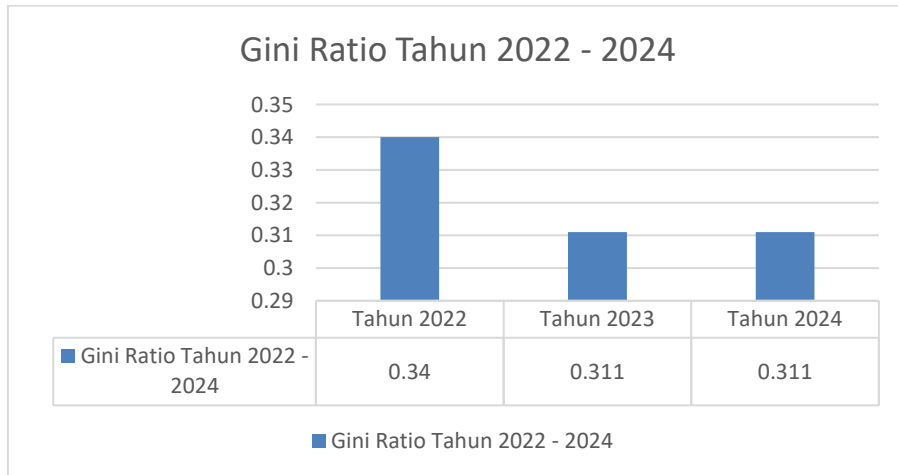
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat juga menyebabkan bertambah lebarnya ketimpangan antar golongan masyarakat (yang kaya dan yang miskin) dan ketimpangan antar wilayah (yang maju dan yang tertinggal). Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan maupun antar wilayah dapat memunculkan permasalahan antara lain kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam. Ketimpangan ekonomi pada dimensi distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat. Fenomena ini telah menjadi perhatian publik, sehingga upaya evaluasi yang sangat mendesak dilakukan. Dari hasil evaluasi diharapkan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya juga akan membawa konsekuensi berkurangnya tingkat ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dapat sejalan dengan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Apabila ketimpangan ini dibiarkan semakin melebar maka akan semakin mendistorsi hasil pembangunan.

Berdasarkan nilai gini ratio Kabupaten Bolaang Mongondow dalam jangka waktu 3 tahun terakhir (Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024) berada kategori rendah yaitu berada pada posisi 0,311.





Gini ratio Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2024 sebesar 0,320, tahun 2023 sama 0,311 namun tahun 2022 naik tajam mencapai 0,340 hal ini disebabkan dampak pandemi Covid 19 yang menyebabkan naiknya angka keparahan kemiskinan.



Analisis terhadap Indikator Rasio Gini di Kabupaten Bolaang Mongondow selama periode 2022-2024 menunjukkan dinamika ketimpangan pendapatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Rasio Gini adalah indikator yang mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah, dengan nilai antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna).

**Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja (Penurunan Ketimpangan):**

**1. Program Penanggulangan Kemiskinan:**

- o Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow telah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, seperti pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan usaha mikro dan kecil. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah dan menurunkan angka kemiskinan.

**2. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan:**

- o Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya



manusia, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

### **Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja (Peningkatan Ketimpangan):**

#### **1. Ketergantungan pada Sektor Tertentu:**

- Ketergantungan ekonomi pada sektor tertentu, seperti pertambangan, dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan jika manfaat ekonomi tidak merata di seluruh lapisan masyarakat.

#### **2. Keterbatasan Infrastruktur:**

- Keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah dapat menghambat akses masyarakat terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang berkontribusi pada ketimpangan pendapatan.

### **Alternatif Solusi yang Telah dan Dapat Dilakukan:**

#### **1. Diversifikasi Ekonomi:**

- Mengembangkan sektor-sektor ekonomi lain, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat.

#### **2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan:**

- Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dapat memberdayakan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan mereka.

#### **3. Pengembangan Infrastruktur:**

- Meningkatkan infrastruktur transportasi, komunikasi, dan layanan publik lainnya untuk memastikan akses yang lebih merata ke peluang ekonomi dan sosial.

#### **4. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM):**

- Menyediakan pelatihan, akses permodalan, dan pasar bagi UMKM dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketimpangan.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Bolaang Mongondow dapat berkurang, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.



## ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 9

### “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah”

Sasaran 9				
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Kontribusi Pertumbuhan Pdrb Sektor Industri Pengolahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (% / Tahun)	10,30	6,95 *(Bolmong Dalam Angka 2025)	59.91
2	Kontribusi Pertumbuhan Pdrb Sektor Pertanian Dan Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (% / Tahun)	2	6,85 *(Bolmong Dalam Angka 2025)	342,5

#### Kontribusi Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (% / Tahun)

Analisis kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow selama periode 2022-2024 menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja sektor ini.

Dari target yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar 10.30% terealisasi 6,95% dengan Capaian Kinerja 59,91%. kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi beberapa faktor dapat diidentifikasi sebagai penyebab keberhasilan atau kegagalan sektor ini.

#### Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja:

##### 1. Peningkatan Investasi dan Kebijakan Pemerintah:

- o Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow telah menetapkan indikator kinerja utama untuk tahun 2024, termasuk kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi.



Meskipun fokus utama pada sektor pertanian dan perikanan, kebijakan ini dapat mendorong pengembangan industri pengolahan terkait, seperti pengolahan hasil pertanian dan perikanan, yang berpotensi meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan secara keseluruhan.

## **2. Pengembangan Infrastruktur:**

- Peningkatan infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas produksi, dapat mempermudah distribusi produk dan efisiensi produksi, sehingga meningkatkan daya saing sektor industri pengolahan.

### **Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja:**

#### **1. Keterbatasan Akses ke Teknologi dan Modal:**

- Industri pengolahan di daerah mungkin menghadapi keterbatasan dalam akses ke teknologi modern dan modal, yang dapat menghambat efisiensi dan produktivitas.

#### **2. Ketersediaan Bahan Baku:**

- Ketergantungan pada sektor pertanian dan perikanan sebagai penyedia bahan baku dapat menyebabkan fluktuasi produksi industri pengolahan jika sektor-sektor tersebut mengalami penurunan produksi.

### **Alternatif Solusi yang Telah dan Dapat Dilakukan:**

#### **1. Peningkatan Akses ke Teknologi dan Pelatihan:**

- Menyediakan pelatihan dan akses ke teknologi modern bagi pelaku industri pengolahan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.

#### **2. Kemitraan dengan Sektor Pertanian dan Perikanan:**

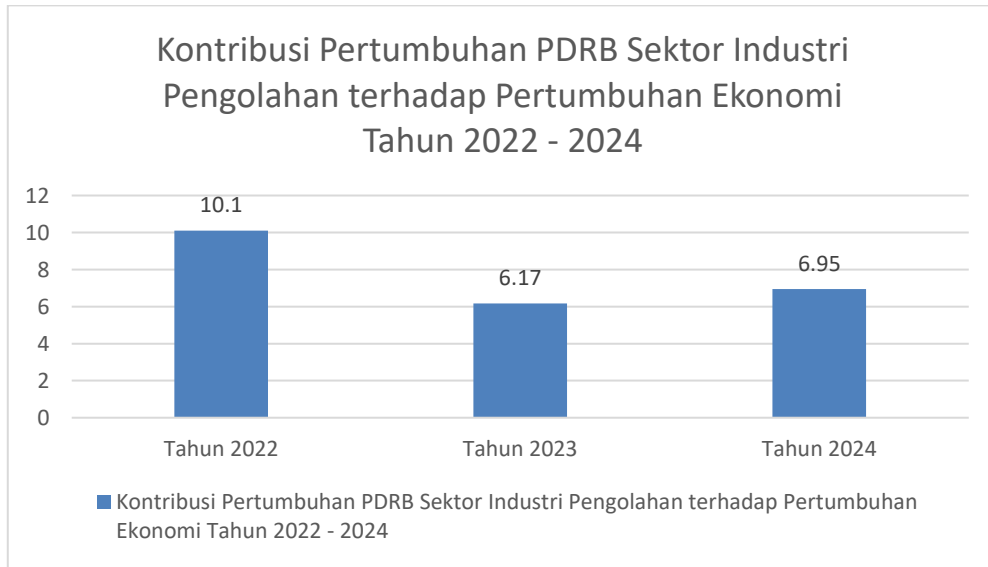
- Membangun kemitraan yang kuat antara industri pengolahan dan sektor pertanian serta perikanan untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang stabil dan berkualitas.

#### **3. Peningkatan Akses ke Pasar:**

- Membantu pelaku industri pengolahan dalam memasarkan produk mereka, baik di tingkat lokal maupun nasional, melalui pameran dagang, platform online, dan jaringan distribusi yang lebih luas.



Dengan mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor tersebut, sektor industri pengolahan di Kabupaten Bolaang Mongondow dapat meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah selama periode 2022-2024.



### **Kontribusi Pertumbuhan PDRB Sektor Sektor Pertanian Dan Perikanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Dilihat indikator Kontribusi Pertumbuhan PDRB Sektor Sektor Pertanian Dan Perikanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Tahun 2024 dengan Target 2% terealisasi sebesar 6,85% dengan Capaian Kinerja sebesar 342.5%, ada Peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2023 menurut Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow dari Data Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bolang Mongondow (persen) tercapai 3,18%.

Analisis kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan bahwa sektor ini memiliki peran penting dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah, Peningkatan tren yang signifikan dapat memberikan gambaran umum mengenai kontribusi sektor ini.

#### **Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja:**



**1. Sumber Daya Alam yang Melimpah:**

- Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki potensi alam yang besar untuk pertanian dan perikanan, yang mendukung produktivitas sektor ini.

**2. Program Pemerintah dan Pelatihan:**

- Pemerintah daerah telah menginisiasi program pelatihan dan penyuluhan untuk petani dan nelayan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengelola usaha.

**3. Peningkatan Infrastruktur:**

- Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas penyimpanan telah mempermudah distribusi hasil pertanian dan perikanan, meningkatkan efisiensi dan akses ke pasar.

**Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja:**

**1. Ketergantungan pada Kondisi Alam:**

- Sektor pertanian dan perikanan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan perubahan iklim, yang dapat menyebabkan fluktuasi produksi.

**2. Kurangnya Akses ke Teknologi Modern:**

- Beberapa petani dan nelayan mungkin belum memiliki akses ke teknologi dan peralatan modern, yang dapat membatasi produktivitas dan efisiensi.

**3. Permodalan Terbatas:**

- Keterbatasan akses ke sumber permodalan dapat menghambat pengembangan usaha dan adopsi praktik pertanian atau perikanan yang lebih efisien.

**Alternatif Solusi yang Telah dan Dapat Dilakukan:**

**1. Diversifikasi Produk:**

- Mengembangkan produk turunan atau olahan dari hasil pertanian dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan membuka pasar baru.

**2. Pengembangan Teknologi dan Inovasi:**



- o Mendorong penggunaan teknologi modern dalam proses produksi dan distribusi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.

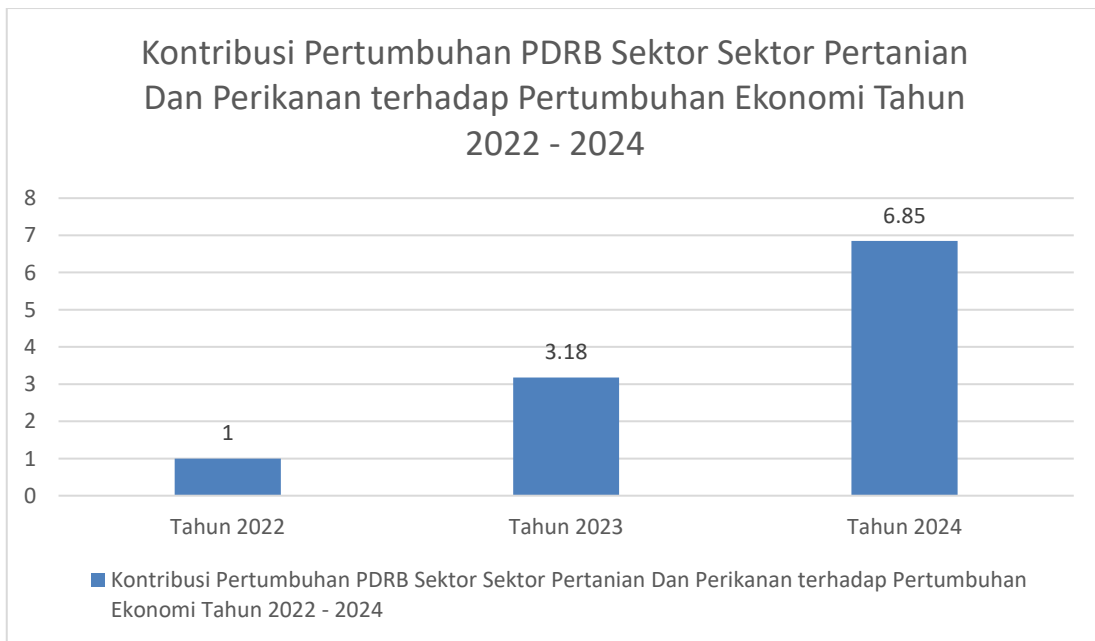
### 3. Kemitraan dan Akses Pasar:

- o Membangun kemitraan dengan sektor swasta dan membuka akses ke pasar yang lebih luas, termasuk ekspor, untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan.

### 4. Peningkatan Akses Permodalan:

- o Menyediakan skema kredit atau bantuan permodalan dengan bunga rendah untuk mendukung pengembangan usaha kecil di sektor pertanian dan perikanan.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan sektor pertanian dan perikanan dapat terus berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow.



## ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 10 "Meningkatnya Daya Tarik Investasi Berskala Nasional"



<b>Sasaran 10</b>				
<b>Meningkatnya Daya Tarik Investasi Berskala Nasional</b>				
<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (Pma/Pmdn) (% / Tahun )	10	6,29	62,9

Peningkatan investasi ikut andil dalam mendongkrak pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDB akan ikut turun.

Investasi juga sebagai sarana dan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya memperluas penyerapan tenaga kerja dalam meningkatkan produksi. Kaum aliran klasik menganggap akumulasi kapital sebagai suatu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Adanya pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Jadi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa dengan melakukan penanaman modal maka dapat meningkatkan pendapatan.

Pada tahun 2024, Kabupaten Bolaang Mongondow menetapkan target peningkatan nilai investasi (PMA/PMDN) sebesar 10, namun realisasi yang dicapai hanya 6,29, menunjukkan pencapaian sekitar 62,9% dari target yang ditetapkan.

#### **Analisis Penyebab Penurunan Kinerja Investasi:**

1. **Kondisi Ekonomi Global dan Nasional:** Fluktuasi ekonomi global, seperti ketidakpastian pasar dan perubahan kebijakan perdagangan internasional, dapat mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya. Selain itu, kondisi ekonomi nasional yang kurang stabil juga dapat menurunkan kepercayaan investor.





2. **Infrastruktur yang Kurang Memadai:** Keterbatasan infrastruktur, seperti jalan, listrik, dan fasilitas pendukung lainnya, dapat menjadi hambatan bagi investor yang ingin berinvestasi di daerah tersebut.
3. **Birokrasi dan Regulasi yang Kompleks:** Proses perizinan yang rumit dan regulasi yang tidak jelas dapat menghambat masuknya investasi baru.
4. **Kurangnya Promosi dan Informasi Investasi:** Minimnya promosi potensi investasi daerah dan kurangnya informasi yang tersedia bagi calon investor dapat mengurangi minat mereka untuk berinvestasi.

**Alternatif Solusi yang Telah atau Dapat Dilakukan:**

1. **Peningkatan Infrastruktur:** Pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi.
2. **Simplifikasi Proses Perizinan:** Menyederhanakan proses perizinan dan memastikan transparansi dalam regulasi untuk memudahkan investor.
3. **Promosi Investasi yang Aktif:** Melakukan promosi aktif mengenai potensi investasi daerah melalui pameran, seminar, dan media lainnya untuk menarik minat investor.
4. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:** Menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, sehingga dapat memenuhi kebutuhan investor.
5. **Insentif bagi Investor:** Memberikan insentif, seperti keringanan pajak atau fasilitas lainnya, untuk menarik investor.

Dengan mengidentifikasi penyebab penurunan kinerja investasi dan menerapkan solusi alternatif yang tepat, diharapkan Kabupaten Bolaang Mongondow dapat mencapai target investasi yang diinginkan di masa mendatang.



## ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN 5

### “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas”

Tujuan 5 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Rata-Rata Capaian Opini BPK, Nilai Sakip, LPPD, Indeks Pelayanan Publik	83,5	80,40	96,29

#### Nilai Rata-Rata Capaian Opini BPK, Nilai Sakip, LPPD, Indeks Pelayanan Publik

Capaian Sasaran ditunjukkan dengan Upaya melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governace*), terjaminnya penegakan hukum terhadap praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang didukung oleh lembaga legislatif daerah yang kuat serta legitimasi penuh masyarakat. Pemerintahan daerah yang baik, bersih dan demokratis adalah daerah yang aman dan damai karena warganya taat dan patuh terhadap



hukum di satu sisi, dan di sisi lain, hak-hak masyarakat terlindungi dan terakomodasi dalam sistem sosial, ekonomi, politik, pemerintahan dan pembangunan.

Pada tahun 2024, Kabupaten Bolaang Mongondow menetapkan target nilai rata-rata capaian untuk beberapa indikator kinerja, yaitu Opini BPK, Nilai SAKIP, LPPD, dan Indeks Pelayanan Publik, sebesar 83,35. Namun, realisasi yang dicapai adalah 80,40, menunjukkan pencapaian sekitar 96,46% dari target yang ditetapkan.

#### **Analisis Penyebab Penurunan Kinerja:**

##### **1. Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan):**

- **Kualitas Laporan Keuangan:** Opini BPK yang kurang optimal dapat disebabkan oleh kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan, seperti kesalahan pencatatan atau kurangnya transparansi.
- **Sistem Pengendalian Internal:** Kelemahan dalam sistem pengendalian internal dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku.

##### **2. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah):**

- **Perencanaan dan Pelaporan Kinerja:** Perencanaan yang tidak selaras dengan pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang kurang akurat dapat menurunkan nilai SAKIP.
- **Evaluasi dan Monitoring:** Kurangnya evaluasi dan monitoring terhadap program dan kegiatan pemerintah dapat menyebabkan ketidakefisienan.

##### **3. LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah):**

- **Kepatuhan terhadap Regulasi:** Ketidakpatuhan terhadap regulasi dan standar yang ditetapkan dapat mempengaruhi kualitas LPPD.
- **Ketersediaan Data:** Kurangnya data yang akurat dan lengkap dapat menghambat penyusunan LPPD yang berkualitas.

##### **4. Indeks Pelayanan Publik:**



- **Kualitas Pelayanan:** Pelayanan yang tidak memenuhi standar atau tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat dapat menurunkan indeks ini.
- **Sumber Daya Manusia:** Kurangnya kompetensi dan profesionalisme aparatur dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik.

**Alternatif Solusi yang Telah atau Dapat Dilakukan:**

**1. Peningkatan Kapasitas Aparatur:**

- Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan, perencanaan, dan pelayanan publik.

**2. Penguatan Sistem Pengendalian Internal:**

- Mengembangkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan meningkatkan akuntabilitas.

**3. Peningkatan Kualitas Data dan Informasi:**

- Membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk memastikan ketersediaan data yang akurat dan real-time dalam penyusunan laporan dan pengambilan keputusan.

**4. Penyederhanaan Proses dan Prosedur:**

- Menyederhanakan proses birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

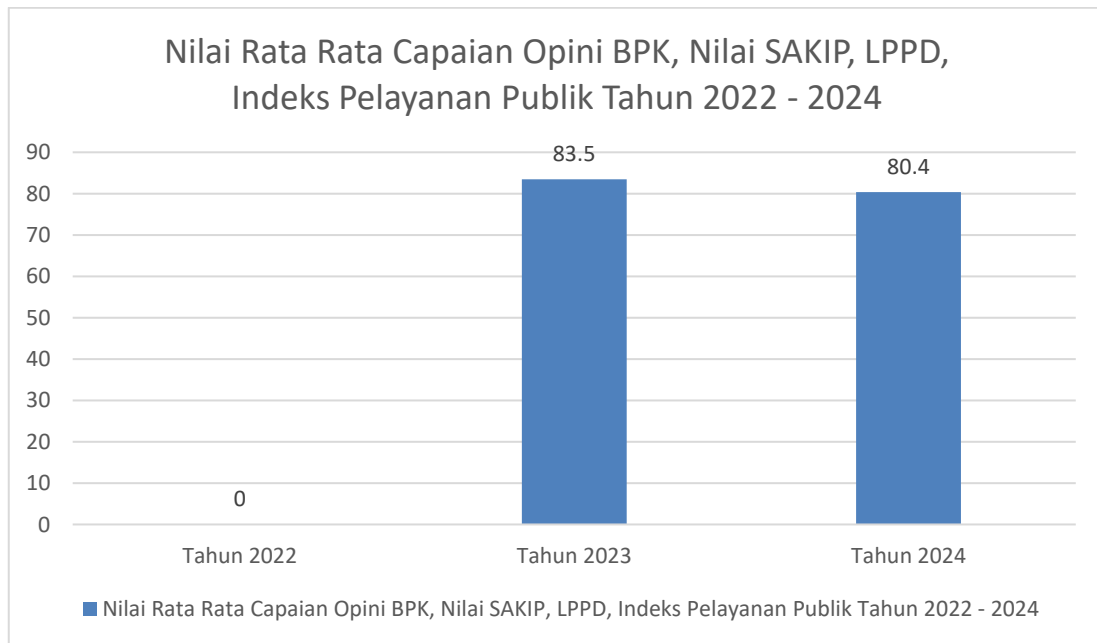
**5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat:**

- Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan publik untuk memastikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

**6. Pemanfaatan Teknologi Informasi:**

- Mengimplementasikan e-government untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas pelayanan publik.

Dengan mengidentifikasi penyebab penurunan kinerja dan menerapkan solusi alternatif yang tepat, diharapkan Kabupaten Bolaang Mongondow dapat meningkatkan capaian indikator kinerja di masa mendatang.



## ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 11

### “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

Sasaran 11				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pelayanan Publik (Zona)	Kuning (80)	Hijau (95,14)	119

#### Indeks Pelayanan Publik (Zona)

Era milenial menuntut manusia untuk berkembang lebih pesat. Perkembangan tersebut mempengaruhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Dengan dinamisnya tuntutan kebutuhan masyarakat mendorong penyelenggara layanan untuk lebih aktif memberikan pelayanan publik yang prima. Itu menandakan adanya hak dan kewajiban yang terbaru yang timbul antara penyelenggara dan masyarakat sebagai penerima layanan publik. Secara umum, hal tersebut tentunya diatur dalam peraturan yang berlaku melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Adapun peraturan tersebut lahir untuk memberikan kepastian hukum antara hubungan penyelenggara dan masyarakat sebagai penerima layanan publik.



Namun, untuk mengukur sejauh mana pelayanan publik telah diberikan secara baik kepada masyarakat perlu adanya suatu tolok ukur. Sehingga pelayanan publik disertai dengan standar pelayanan yang menjadi tolok ukur untuk digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Selain tersedia standar pelayanan, masyarakat juga dipenuhi hak-haknya melalui maklumat pelayanan, yaitu pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang tercantum dalam standar pelayanan.

### **Standar Pelayanan sebagai Kepastian Layanan**

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu adanya prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh penyelenggara supaya dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Adapun prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam asas pelayanan publik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 bahwa asas-asas pelayanan publik meliputi asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Selain berdasarkan asas-asas pelayanan publik, penyelenggara maupun penerima layanan memiliki hak dan kewajiban dalam pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Hal inilah yang kemudian menarik untuk dikaji. Apabila berbicara mengenai hak dan kewajiban tentunya ada konsekuensi tersendiri apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Oleh karena itu, perlu adanya suatu indikator yang dapat menilai ketercapaian hal tersebut. Mari kita bahas satu per satu. Penyelenggara pelayanan publik memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dalam pelayanan publik. Adapun kewajiban yang terkait dalam tulisan ini adalah menyusun, menetapkan standar pelayanan bahkan mempublikasikan



maklumat pelayanan. Adapun kewajiban tersebut sebagai hak masyarakat untuk mengetahui, mengawasi bahkan mengadukan setiap pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Hal tersebut dilaksanakan demi pelaksanaan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan publik.

Adapun standar pelayanan diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pada dasarnya penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan bahkan dengan melibatkan masyarakat. Terdapat beberapa komponen standar pelayanan yang meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan, serta evaluasi kinerja pelaksana. Selain standar pelayanan, penyelenggara pelayanan juga perlu menyusun maklumat pelayanan sebagai pemenuhan kewajiban dan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Pada akhirnya, standar pelayanan ini menjadi fokus dalam pengawasan pelayanan publik yang notabene dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik. Adapun kegiatan tersebut selanjutnya disebut dengan Survei Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik.

Predikat Kepatuhan Tinggi atau Zona Hijau diperoleh dari rentang nilai 78-100, Predikat Kepatuhan Sedang atau Zona Kuning diperoleh dari rentang nilai 54,00-77,99, Akumulasi nilai tersebut diperoleh dari bobot nilai per-variabel pertanyaan yang dilihat dari sisi ketampakan fisik pada penyelenggara layanan administratif baik tingkat pusat maupun Daerah.



Pada tahun 2024, Kabupaten Bolaang Mongondow menargetkan **Zona Kepatuhan Pelayanan Publik** berada pada kategori **Kuning (80)**, tetapi realisasinya melampaui target hingga **Hijau (95,14)**. Ini menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan dalam kepatuhan pelayanan publik.

### **Analisis Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja**

#### **1. Peningkatan Komitmen Pemerintah Daerah**

- Pemda menunjukkan komitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memastikan regulasi dan SOP diikuti dengan baik.

#### **2. Penerapan Standar Pelayanan Publik yang Lebih Baik**

- Meningkatnya kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, termasuk transparansi prosedur, waktu layanan yang lebih cepat, dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

#### **3. Penggunaan Teknologi dalam Pelayanan Publik**

- Implementasi **e-government** dan **digitalisasi layanan** memungkinkan masyarakat mengakses layanan dengan lebih mudah dan efisien.

#### **4. Penguatan Pengawasan dan Evaluasi**

- Pengawasan yang lebih ketat dan evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan publik membantu dalam mendeteksi dan mengatasi kendala secara cepat.

#### **5. Peningkatan SDM dan Kompetensi Aparatur**

- Pelatihan bagi ASN dalam hal pelayanan publik meningkatkan profesionalisme dan keterampilan dalam melayani masyarakat.

#### **6. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Masyarakat**

- Masyarakat lebih dilibatkan dalam pengawasan pelayanan publik, baik melalui pengaduan online maupun forum diskusi dengan pemerintah daerah.

### **Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan untuk Meningkatkan Kinerja**

#### **1. Penguatan Regulasi dan SOP Pelayanan Publik**

- Menyusun dan menyempurnakan standar pelayanan publik yang lebih jelas dan terukur untuk memastikan kepatuhan yang lebih tinggi.





## 2. Mendorong Digitalisasi Layanan Publik

- Mengembangkan aplikasi dan platform digital untuk mempercepat proses pelayanan serta meningkatkan transparansi.

## 3. Peningkatan Kapasitas Aparatur

- Mengadakan pelatihan rutin terkait standar pelayanan publik dan etika dalam melayani masyarakat.

## 4. Mekanisme Pengawasan dan Umpan Balik yang Efektif

- Menyediakan kanal pengaduan masyarakat yang mudah diakses serta menindaklanjuti keluhan dengan cepat.

## 5. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dan Stakeholder

- Melibatkan masyarakat dalam penilaian dan pengawasan pelayanan publik untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai kebutuhan mereka.

Dengan keberhasilan ini, Kabupaten Bolaang Mongondow dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan publik ke tingkat yang lebih baik di masa mendatang.





Hasil ini perlu disikapi secara positif dengan upaya dan komitmen Pimpinan. Terhadap hasil penilaian tersebut, Ombudsman RI menyarankan agar:

1. Memberikan apresiasi (award) kepada pimpinan unit pelayanan publik yang produk layanannya mendapat Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi. Hal ini penting sebagai bentuk penghargaan atas segala upaya dan komitmen pimpinan unit memenuhi komponen standar pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Memberi teguran dan mendorong implementasi standar pelayanan publik kepada para pimpinan unit pelayanan publik yang produk layanannya mendapatkan Zona Merah dengan Predikat Kepatuhan Rendah dan Zona Kuning dengan Predikat Kepatuhan Sedang.
3. Menyelenggarakan program secara sistematis dan mandiri untuk mempercepat implementasi standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Kewajiban penyelenggara layanan dalam mempublikasikan standar pelayanan publik diawali dengan penyusunan yang melibatkan partisipasi publik, penetapan dan implementasi standar pelayanan. Sekiranya diperlukan, Ombudsman RI bersedia membantu dan/memfasilitasinya.
4. Menunjuk pejabat yang kompeten untuk memantau konsistensi dan peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik. Setiap unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Terdapat lebih dari 10 komponen standar pelayanan yang harus dipenuhi penyelenggara pelayanan publik demi terciptanya kualitas pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat.
5. Mempercepat perbaikan dan peningkatan tata kelola pelayanan yang terintegrasi dengan menerapkan asas pendelegasian wewenang atas produk layanan, dukungan manajemen sumber daya manusia yang profesional, serta pemenuhan sarana dan prasarana dalam menjalankan proses pelayanan.



## ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 12 “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih”

Sasaran 12				
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Opini Bpk (Opini)	WTP	WTP *(Opini BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2023)	100
2	Nilai Sakip (Nilai/Predikat)	BB (71)	B (65,35) *(Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023)	92,05
3	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Angka)	3,7	3,0528 *(Hasil Penilaian Dari Kemendagri Tahun 2022)	82,51

### Opini BPK

Pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah untuk memeriksa kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dari kegiatan yang dilakukan BPK tersebut, jenis pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan bentuk pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Analisis terhadap Capaian Indikator Opini BPK Tahun 2024 Masih Dalam Tahap Pemeriksaan BPK dan hasilnya akan dirilis pada Juni Tahun 2025 sedangkan Pada tahun 2023, Kabupaten Bolaang Mongondow menargetkan **Opini BPK** dengan predikat **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 100**, dan target ini berhasil tercapai dengan realisasi **WTP (100)**. Hal ini menunjukkan kinerja



yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntabilitas yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

### **Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Opini WTP**

#### **1. Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel**

- Pemerintah daerah mampu mengelola anggaran dengan baik, sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah.

#### **2. Penerapan Sistem Pengendalian Internal yang Efektif**

- Adanya mekanisme pengendalian internal yang kuat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan sehingga mengurangi potensi kesalahan atau penyimpangan.

#### **3. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar Akuntansi Pemerintah**

- Kabupaten Bolaang Mongondow telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah.

#### **4. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Keuangan**

- Peningkatan kompetensi aparatur dalam bidang akuntansi, pelaporan keuangan, dan regulasi keuangan daerah melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

#### **5. Sinergi dan Kolaborasi Antar Instansi**

- Koordinasi yang baik antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan instansi terkait dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

#### **6. Dukungan Teknologi dalam Pengelolaan Keuangan**

- Pemanfaatan sistem informasi keuangan berbasis teknologi untuk memastikan pencatatan dan pelaporan yang lebih akurat dan efisien.

### **Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan untuk Mempertahankan WTP**

#### **1. Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi Keuangan Daerah**

- Memperkuat pengawasan internal serta melakukan audit berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah.



## 2. Optimalisasi Sistem Keuangan Berbasis Digital

- o Memanfaatkan sistem e-budgeting dan e-reporting untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

## 3. Bimbingan Teknis dan Pelatihan Rutin bagi Aparatur

- o Mengadakan pelatihan berkala terkait pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi pemerintahan, dan tata kelola anggaran yang baik.

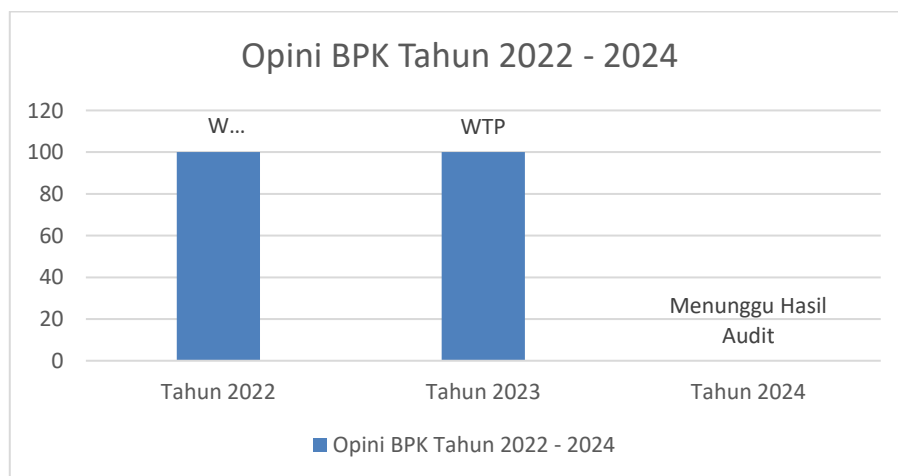
## 4. Penguatan Komitmen Pimpinan dan OPD

- o Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pimpinan serta perangkat daerah dalam mengelola anggaran dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

## 5. Meningkatkan Peran Masyarakat dan DPRD dalam Pengawasan

- o Melibatkan masyarakat dan DPRD dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan anggaran untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan mempertahankan opini **WTP**, Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik. Ke depannya, upaya perbaikan dan inovasi perlu terus dilakukan agar kualitas pengelolaan keuangan semakin meningkat dan berdampak positif bagi pembangunan daerah.



## Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi pemerintah dan peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada peraturan menteri tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 atas Capaian Kinerja Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow masih dalam tahap Penyusunan.

Pada tahun 2024 atas Capaian Kinerja Tahun 2023, Kabupaten Bolaang Mongondow menargetkan **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** dengan predikat **BB (71)**, namun realisasi yang dicapai hanya **B (65,35)**. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sistem akuntabilitas pemerintahan masih belum mencapai target yang diharapkan.

### **Analisis Penyebab Penurunan Kinerja SAKIP**

#### **1. Perencanaan Kinerja yang Kurang Optimal**

- o Masih terdapat kelemahan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga sulit mengukur efektivitas pelaksanaan program.

#### **2. Keterbatasan Implementasi Manajemen Kinerja**

- o Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum sepenuhnya memahami dan menerapkan konsep manajemen kinerja berbasis hasil, sehingga masih terdapat ketidaksesuaian antara target dan realisasi.

#### **3. Kurangnya Evaluasi dan Monitoring yang Konsisten**



- Pengawasan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan belum dilakukan secara berkala dan sistematis, sehingga perbaikan dan tindak lanjut menjadi kurang efektif.
- 4. SDM yang Belum Sepenuhnya Kompeten dalam Pengelolaan Kinerja**
  - Aparatur yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan SAKIP masih memerlukan peningkatan kapasitas dalam menyusun indikator kinerja dan mengelola data berbasis hasil.
- 5. Penggunaan Teknologi dalam Manajemen Kinerja yang Belum Maksimal**
  - Sistem informasi dan teknologi yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja belum optimal, sehingga proses akuntabilitas masih banyak dilakukan secara manual.

#### **Alternatif Solusi yang Telah atau Dapat Dilakukan**

- 1. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Manajemen Kinerja**
  - Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparatur terkait dalam penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, serta evaluasi berbasis hasil.
- 2. Optimalisasi Sistem Pengukuran Kinerja Berbasis Digital**
  - Mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi untuk mendukung pemantauan dan evaluasi kinerja yang lebih transparan dan real-time.
- 3. Penyempurnaan Perencanaan Kinerja yang Berorientasi Hasil**
  - Memastikan bahwa dokumen perencanaan yang disusun oleh setiap OPD berbasis pada hasil (outcome) yang dapat diukur dan dievaluasi dengan jelas.
- 4. Penguatan Evaluasi dan Pengawasan Secara Berkala**
  - Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi secara rutin untuk memastikan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat nyata.
- 5. Peningkatan Komitmen Pimpinan dan OPD dalam Implementasi SAKIP**



- o Mendorong setiap pimpinan daerah dan kepala OPD untuk lebih berkomitmen dalam menjalankan sistem akuntabilitas kinerja dengan lebih disiplin dan konsisten.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Kabupaten Bolaang Mongondow diharapkan dapat meningkatkan nilai SAKIP dan mencapai target **BB (71)** atau bahkan lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Adapun terkait rincian Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 - 2023 secara lebih detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

#### Komponen Penilaian Nilai AKIP Kabupaten Bolaang Mongondow

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Tahun	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	22,83	22,93
2	Pengukuran Kinerja	30	18,10	18,28
3	Pelaporan Kinerja	15	9,38	9,54
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,25	14,60
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>64,56</b>	<b>65,35</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>	<b>B</b>

Adapun rekomendasi dari Kemenpan RB RI

1. Melakukan reuiu atas dokumen perencanaan kinerja jangka menengah guna memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan telah berorientasi outcome dan sesuai dengan jenjang levelnya.
2. Menyempurnakan pohon kinerja yang dimiliki dengan cara memastikan pohon kinerja yang disusun telah memenuhi prinsip logis/logical framework yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan critical success factor (CSF) untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan sehingga penetapan kondisi kinerja antar level tidak berulang;





3. Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap PD dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja seperti: memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented); memastikan kualitas indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) terutama pada kriteria spesifik, relevan, dan terukur;
4. Memastikan kembali program dan kegiatan yang dimiliki pada level PD untuk lebih berfokus pada pencapaian kinerja sehingga tercipta birokrasi yang efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki;
5. Menjelaskan seluruh kinerja yang diperjanjikan dalam perencanaan strategis ke dalam laporan kinerja sehingga dapat memberikan informasi kinerja yang terukur sesuai dengan yang diperjanjikan dan seharusnya dicapai. Hal ini bertujuan agar laporan kinerja dapat berfungsi sebagai media perbaikan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kinerja
6. Meningkatkan kualitas laporan kinerja PD dengan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi deskriptif program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja dan melakukan benchmark dari kabupaten/kota, provinsi, dan apabila memungkinkan dengan nasional untuk kinerja yang sifatnya strategis serta menjadikan laporan akuntabilitas kinerja dengan informasi yang lengkap sebagai standar atau pedoman untuk dapat diimplementasikan ke seluruh PD;
7. Mendorong adanya monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas internal PD dilakukan secara berkala, sehingga tindaklanjut rekomendasi dapat mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja tingkat PD dan akan berpengaruh juga pada tingkat Pemda;
8. Mendorong pelaksanaan evaluasi internal agar di laksanakan kepada seluruh tahun 2023 sehingga secara internal, sehingga Pemda dapat memiliki gambaran secara utuh terkait kualitas implementasi SAKIP Pemda dari sisi internal;



9. Mendorong pemanfaatan hasil Evaluasi AKIP internal yang sudah dilakukan sebagai bagian dari penilaian reward dan punishment kepada PD, sehingga PD lebih semangat dalam mendorong perbaikan implementasi SAKIP kedepannya.

### **Nilai / Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun, Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. **Penyusunan LPPD mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi dan dinilai oleh Inspektorat Daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/10582/OTDA Hal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2024. Data dan dokumen pendukung sebelum ditandatangani Kepala Perangkat Daerah wajib di reviu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.**

Penetapan peringkat, skor dan status kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam proses EPPD dilakukan melalui proses penilaian kinerja dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Penilaian aspek capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri dari:
- b. Konversi nilai capaian kinerja menjadi skor
- c. Perhitungan capaian kinerja makro
- d. Perhitungan perubahan capaian kinerja makro
- e. Perhitungan capaian kinerja urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan.

Perhitungan Skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penetapan peringkat atau Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi yakni dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di  
Kelompokkan ke Dalam 5 Klasifikasi

No.	Skor Kinerja	Status Kinerja
1.	1.00-1.80	Sangat Rendah
2.	1.81-2.60	Rendah
3.	2.61-3.40	Sedang
4.	3.41-4.20	Tinggi
5.	4.21-5.00	Sangat Tinggi

Berdasarkan klasifikasi skor kinerja dan status kinerja diatas, Tahun 2019 target skor LPPD Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow yakni 3,5 dengan capaian target 3,41 dengan status kinerja Tinggi Sehingga mengacu pada target skor Tahun 2019 tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan skor LPPD setiap tahunnya minimal kenaikan 0,1 dari target tahun 2019 sehingga tahun 2023 target skor LPPD menjadi 3,6; Tahun 2024 target skor LPPD 3,7; Tahun 2025 target LPPD 3,8 dan ditahun 2026 target skor LPPD mecapai 3,9 dengan status kinerja dari tahun 2023 s/d 2026 Tinggi. *(Yang Ini Menjelaskan tentang Kenaikan Target Per Tahun)*

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Nilai/Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	3,0528	Belum Rilis	Dalam Tahap Penyusunan

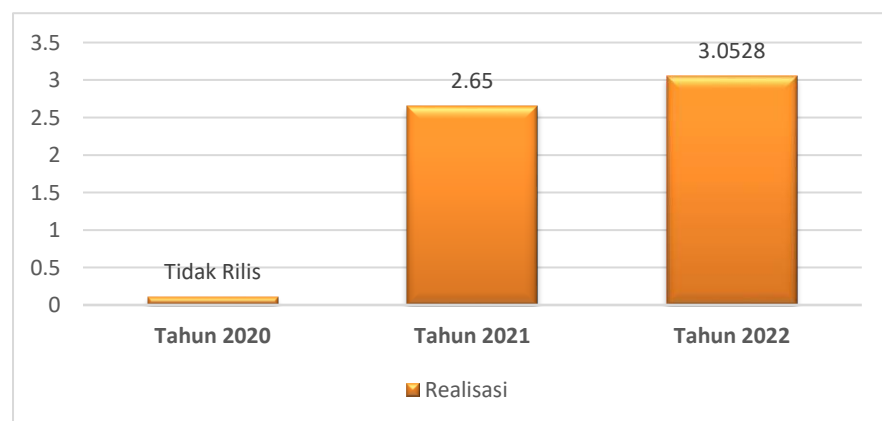
Capaian Nilai/Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 Masih dalam Tahap Penyusunan sedangkan Capaian Nilai/Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun



2023 Belum Rilis. Adapun Capaian Nilai/Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2022 adalah 3,0528 dengan Kaegori (Sedang). Hal - Hal yang berpengaruh pada Capaian Nilai LPPD Tahun 2022 Karena masih ada Perangkat Daerah yang terlambat memasukkan Data pada saat Inspektorat Provinsi Mengadakan Pemeriksaan LPPD. Sehingga Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tidak dapat Menganalisa / Menganalisis Hasil Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang terlambat memasukkan Data. Sehingga kedepannya Perangkat daerah akan memperbaiki Kinerja yang lebih Baik.

Faktor yang mempengaruhi indikator sasaran ini adalah ketelitian dari semua pihak yang berkopeten dalam menyusun peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow.

#### Perbandingan Target dan Realisasi Nilai / Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2020 - 2022



#### ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN 6 "MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH"

No	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Indeks Ketahanan Pangan	84,99	*83,26 (Indeks Ketahanan Pangan Badan	98,02%



			Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2023)	
--	--	--	---------------------------------------	--

### Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.





Pada tahun 2024, Kabupaten Bolaang Mongondow menargetkan **Indeks Ketahanan Pangan** sebesar **84,99**, tetapi realisasi yang dicapai hanya **83,26**. Meskipun pencapaian ini mendekati target, masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya angka yang diharapkan.

#### **Analisis Penyebab Penurunan Kinerja Indeks Ketahanan Pangan**

1. **Faktor Produksi Pertanian yang Tidak Optimal**
  - Produksi pangan belum mencapai tingkat yang maksimal akibat berbagai faktor seperti perubahan cuaca, keterbatasan akses terhadap sarana produksi pertanian (benih, pupuk, dan irigasi), serta hama dan penyakit tanaman.
2. **Distribusi dan Akses Pangan yang Belum Merata**
  - Meskipun produksi cukup, distribusi pangan ke seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow belum optimal, terutama di daerah terpencil atau sulit dijangkau.
3. **Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim**
  - Cuaca ekstrem seperti kekeringan atau curah hujan berlebih berpengaruh terhadap hasil pertanian dan perikanan, yang berdampak pada ketersediaan pangan di daerah.
4. **Keterbatasan Infrastruktur Pendukung**
  - Infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi, jalan pertanian, serta fasilitas penyimpanan dan pengolahan pangan belum sepenuhnya memadai untuk mendukung ketahanan pangan.
5. **Kurangnya Diversifikasi Pangan Lokal**
  - Konsumsi pangan masyarakat masih bertumpu pada beberapa komoditas tertentu, sehingga jika terjadi gangguan produksi, ketahanan pangan menjadi rentan.
6. **Minimnya Pemanfaatan Teknologi dalam Pertanian**
  - Penggunaan teknologi pertanian yang modern masih terbatas, sehingga produktivitas dan efisiensi produksi pangan belum optimal.

#### **Alternatif Solusi yang Telah atau Dapat Dilakukan**

1. **Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pangan**
  - Meningkatkan akses petani terhadap benih unggul, pupuk, serta teknologi pertanian modern untuk meningkatkan hasil produksi.
  - Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian dengan metode pertanian berkelanjutan.
2. **Penguatan Sistem Distribusi dan Akses Pangan**



- Meningkatkan jaringan infrastruktur jalan dan transportasi untuk memperlancar distribusi pangan ke seluruh wilayah.
  - Mendorong pengembangan pasar lokal untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pangan dengan harga yang stabil.
- 3. Mitigasi Dampak Perubahan Iklim**
- Mengembangkan sistem pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim, seperti penggunaan varietas tahan kekeringan atau metode irigasi hemat air.
  - Memperkuat program asuransi pertanian bagi petani yang terdampak bencana alam.
- 4. Penguatan Infrastruktur Pendukung Ketahanan Pangan**
- Membangun dan memperbaiki sistem irigasi, penyimpanan pangan, serta fasilitas pengolahan hasil pertanian agar ketahanan pangan lebih terjamin.
- 5. Diversifikasi Pangan dan Edukasi Gizi Masyarakat**
- Mendorong konsumsi pangan lokal yang beragam dan bergizi untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu.
  - Mengadakan kampanye dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan pola konsumsi yang lebih beragam.
- 6. Digitalisasi dan Pemanfaatan Teknologi Pertanian**
- Memanfaatkan teknologi pertanian digital seperti sensor tanah, sistem irigasi otomatis, dan pemantauan cuaca berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi.
  - Memberikan pelatihan kepada petani tentang penggunaan teknologi modern dalam pertanian.

Dengan penerapan solusi-solusi ini, Kabupaten Bolaang Mongondow diharapkan dapat meningkatkan **Indeks Ketahanan Pangan** dan mencapai target yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.



### ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 13 "Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Ketersediaan Pangan"

<b>Sasaran 13</b>				
<b>Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Ketersediaan Pangan</b>				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Pangan (Angka)	1,14	1,10 (Lakip DKP)	96,49

#### Analisis Kinerja Indikator Rasio Pangan Tahun 2024

**Target: 1,14 | Realisasi: 1,10**

Pada tahun 2024, Kabupaten Bolaang Mongondow menargetkan **Rasio Pangan** sebesar **1,14**, namun realisasi yang dicapai hanya **1,10**. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun ketersediaan pangan masih mencukupi, namun tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

#### Analisis Penyebab Penurunan Rasio Pangan

1. **Penurunan Produksi Pertanian dan Perikanan**
  - Faktor cuaca yang kurang mendukung seperti curah hujan tinggi atau musim kemarau yang lebih panjang dapat berdampak pada hasil panen.
  - Serangan hama dan penyakit tanaman yang menyebabkan produktivitas pertanian menurun.
2. **Keterbatasan Akses terhadap Sarana Produksi Pertanian**





- Keterlambatan atau kelangkaan distribusi pupuk dan benih unggul menghambat peningkatan produksi pangan.
- Keterbatasan irigasi di beberapa daerah menyebabkan ketergantungan pada curah hujan.

### **3. Permasalahan Distribusi dan Akses Pangan**

- Kendala infrastruktur seperti jalan yang kurang memadai menyebabkan keterlambatan dalam distribusi pangan ke beberapa wilayah.
- Sistem logistik dan rantai pasok pangan yang belum optimal sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi.

### **4. Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat**

- Adanya perubahan pola konsumsi masyarakat yang beralih dari produk pangan lokal ke produk impor atau pangan olahan yang lebih mudah diakses.

### **5. Kurangnya Pemanfaatan Teknologi dalam Pertanian**

- Masih rendahnya penggunaan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi pangan.

### **6. Minimnya Diversifikasi Pangan Lokal**

- Ketergantungan pada beberapa jenis komoditas tertentu menyebabkan ketahanan pangan menjadi rentan ketika terjadi gangguan produksi.

## **Alternatif Solusi yang Telah atau Dapat Dilakukan**

### **1. Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan**

- Meningkatkan program bantuan benih unggul, pupuk, dan alat pertanian bagi petani untuk mendorong produktivitas.
- Meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian melalui metode pertanian berkelanjutan dan optimalisasi sistem irigasi.

### **2. Perbaiki Sistem Distribusi Pangan**

- Meningkatkan infrastruktur jalan dan sarana transportasi untuk memperlancar distribusi pangan ke seluruh wilayah.



- Mengembangkan sistem logistik pangan yang lebih efisien dengan dukungan teknologi digital.
- 3. Diversifikasi Pangan dan Edukasi Masyarakat**
- Mengembangkan dan mendorong konsumsi pangan lokal yang lebih beragam agar tidak bergantung pada satu atau dua komoditas utama.
  - Melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan lokal untuk mendukung ketahanan pangan daerah.
- 4. Penggunaan Teknologi dalam Pertanian**
- Memperluas pemanfaatan teknologi pertanian seperti sistem irigasi pintar, penggunaan drone untuk pemantauan lahan, dan aplikasi pertanian digital untuk meningkatkan efisiensi produksi.
- 5. Meningkatkan Kolaborasi dengan Swasta dan Sektor Perdagangan**
- Menjalinkan kerja sama dengan pihak swasta dan pengusaha agribisnis untuk mendukung pemasaran hasil pertanian dan mengurangi hambatan distribusi pangan.
  - Mengembangkan pasar hasil pertanian lokal dengan promosi dan pemasaran berbasis digital.
- 6. Mendorong Program Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas**
- Mengembangkan kebun pangan keluarga dan urban farming untuk meningkatkan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga.
  - Mendorong program lumbung pangan desa sebagai cadangan pangan masyarakat saat terjadi penurunan produksi.

Dengan implementasi solusi-solusi ini, diharapkan Kabupaten Bolaang Mongondow dapat meningkatkan **Rasio Pangan** dan mencapai target yang lebih baik di tahun mendatang, sekaligus memastikan ketahanan pangan daerah tetap terjaga secara berkelanjutan.



## Bab. IV PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian Indikator Tujuan, indikator sasaran terhadap 9 sasaran yang mencakup 15 indikator kinerja utama, diketahui bahwa 7 indikator sasaran Baik Sekali, 4 indikator sasaran Kurang, 4 indikator sasaran Nilai Belum Keluar. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 100% atau bermakna **Baik Sekali**.. Olehnya capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2020 **Baik Sekali**.

Namun demikian, ada 4 indikator kinerja yang belum dapat dihitung dan penyebabnya antara lain:

1. Nilai / Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), karena belum ada rilis resmi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Nilai / Peringkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) masih menunggu evaluasi dan penetapan Nilai / Peringkat AKIP oleh Kementerian PAN dan RB melalui Inspektorat provinsi Sulut yang dilaksanakan setelah Tahun Anggaran berakhir.
3. Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah serta tindak lanjut rekomendasi di LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, karena belum ada Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia karena sedang dalam masa pemeriksaan;



4. Indikator Nilai Kepatuhan Standart Pelayanan Publik Sesuai UU No 25 Tahun tentang Pelayanan Publik Tahun 2020 masih menunggu Hasil Evaluasi dari OMBUDSMAN RI;

Solusi :

1. Untuk peningkatan Nilai Laporan perlu dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Kunci melalui seluruh dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
2. Ketersediaan dokumen yang dibutuhkan dalam pemenuhan indicator LPPD, Ketersedian dokumen penunjang dalam pemeriksaan Keuangan dan realisasi fisik anggaran;
3. Menciptakan kebijakan baru terhadap pemenuhan data yang dibutuhkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
4. Merencanakan formulasi pengukuran yang baru; dan
5. Menentukan indikator sasaran yang measurable / dapat diukur.
6. Untuk Peningkatan Nilai Kepatuhan Stadart Pelayanan Publik dilihat dari sarana dan Prasarana Publik yang telah dilaksanakan oleh Instansi yang menjalankan Pelayanan.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 - 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Tahun 2024 merupakan tahun Ketiga dan tahun momentum untuk merefleksikan pelaksanaan pembangunan daerah.

Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala



kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.